

DINAMIKA POLITIK PEREMPUAN ACEH

Ainol Mardhiah, S.Ag.,M.Si

Zulham, BA.,MA

M Husen MR, Sp.,MA

Muhammad Fazil, S.Ag., S.Soc.,Sc.



UNIMAL PRESS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, berkat rahmat dan hidayah-NYA kami dapat menyelesaikan buku kecil ini dengan judul “Pemberdayaan (*empowerment*) Politik Perempuan di Aceh”. Dalam menyelesaikan tulisan ini banyak hal yang harus penulis bayar, utang kasih sayang buat keluarga dan orang tua yang tidak pernah henti mengiringi goresan demi goresan dalam buku ini. Untaian doa yang tidak henti-hentinya dari orang-orang yang mencintai penulis.

Penyelesaian buku ini tidak terlepas dari campur tangan berbagai pihak dan untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada KEMENRISTEKDIKTI yang telah mendanai buku ini dalam program penelitian Hibah Bersaing, selanjutnya terima kasih kepada bapak Rektor Universitas Malikussaleh, Bpk. Prof.Dr.Apridar, SE.,M.Si, Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, Bpk.M.Akmal, S.Sos.,MA., dan kepada seluruh dosen di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Malikussaleh yang telah memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam penyelesaian buku ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada suami/istri dan anak-anak kami semua atas utang kasih sayang kepada kalian semua. Tentunya harapan kritikan dan masukan perbaikan kearah membangun sangat diperlukan demi menjadikan buku ini lebih baik lagi.

Akhirnya dengan bantuan yang telah diberikan ini baik dari mereka yang tidak tersebutkan satu persatu dalam buku ini, penulis ucapkan jazaakumullah khairan katsiran. Semoga segala bantuan dan budi baik akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah Swt. Aamin. Dengan segala keterbatasan dan kelemahan yang ada di dalamnya, mudah-mudahan buku ini mampu memberikan manfaat.

Lhokseumawe,

2016

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PROLOG: EKSISTENSI POLITIK PEREMPUAN ACEH, SEBUAH CATATAN	1
BAB II ACEH DALAM LINTASAN SEJARAH	8
A. Aceh dan Sejarah Keberadaannya	8
B. Geografis	10
C. Tingkat Pendidikan	12
D. Agama	13
E. Data Penduduk kabupaten Aceh Utara	13
BAB III HAMPARAN METODOLOGI	11
A. Lokasi Penelitian.....	16
B. Teknik Pengumpulan Data	16
C. Teknik Analisa Data	17
D. Luaran yang Ingin Dicapai	18
E. Karakteristik Informan	19
BAB IV DISKURSUS FEMINISME DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ACEH	23
A. Feminisme	23
B. Pemberdayaan	23
C. Pemberdayaan Perempuan	26
BAB V. STRUKTURAL DAN KULTURAL PEREMPUAN ACEH DALAM POLITIK	29
A. Karakteristik Alasan Berkenaan dengan Struktural dan Kultural masyarakat dalam Tahun Pertama.....	29
1. Faktor Struktural	31
2. Faktor Kultural	38
BAB VI. PEREMPUAN DALAM RUANG PUBLIK DAN STRATEGI PEMBERDAYAANNYA	47

A. Karakteristik pendapat keterlibatan Perempuan pada lembaga Lembaga dan Istitusi politik dan keterlibatan dalam pengambilan Keputusan bagi politik perempuan.....	47
B. Pandangan Terhadap Strategi Pemberdayaan Politik bagi Perempuan.....	55
BAB VII. EPILOG: CATATAN AKHIR KESIMPULAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PROLOG: EKSISTENSI POLITIK PEREMPUAN ACEH, SEBUAH CATATAN

Ketika sebuah konflik dalam suatu wilayah teritori politik berakhir, maka hal utama yang harus ditempatkan untuk memastikan damai terbangun sekaligus menjadi usaha pencegahan konflik (*conflict prevention*) dengan mendukung usaha-usaha demokratisasi dan penguatan kapasitas (*capacity building*) bagi institusi demokrasi. Demokrasi adalah satu-satunya model pemerintahan yang memberikan ruang bagi keadilan, pemberdayaan (*empowerment*), legitimasi popular, dan kesetaraan.

Institusi dan proses-proses demokrasi merepresentasikan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan ini membantu pengaturan akan banyaknya kepentingan yang saling berkompetisi dengan cara munculnya kompromi-kompromi politik, yang berarti juga membantu meminimalisir potensi kemunculan perbedaan yang berakhir dengan konflik dan kekerasan.

Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif (DPR, DPD dan DPRD/DPRK), dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.21 Tahun 2013 merupakan pesta besar dalam demokrasi di Indonesia. Hal ini tentunya diperlukan pemberdayaan (*empowerment*) semua pihak, mulai dari lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, lembaga-lembaga lain sebagai pendukung, dan tentunya pemberdayaan (*empowerment*) secara aktif masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk memilih.

Pemilihan umum (Pemilu) dalam hal ini yakni sebagai pintu masuk yang mengantarkan pada transisi demokrasi. Dalam transisi demikian, berbagai tantangan bisa saja muncul seperti keberadaan kelompok kepentingan tertentu, peran

pemerintah pusat, ataupun tidak berfungsinya proses politik. Disinilah kiranya pemberdayaan (*empowerment*) perempuan menemukan konteksnya, yakni ketika demokrasi menjadi jaminan bagi terbukanya ruang bagi penglibatan perempuan di berbagai proses dan institusi demokrasi.

Perempuan, berdasarkan jumlah, mencakup separuh dari keseluruhan jumlah anggota masyarakat di segala tempat di dunia. Apakah ini tidak berarti bahwa perempuan seharusnya merupakan separuh solusi dari semua persoalan yang muncul di masyarakat tersebut? Untuk konteks Aceh yang tengah membangun perdamaian dan bertransisi, ini sama artinya dengan mempertanyakan dimana peran, kesempatan, dan keterlibatan perempuan dalam proses-proses yang dijalankan saat ini.

Reintegrasi dan desentralisasi ternyata masih menyisakan persoalan-persoalan peminggiran perempuan secara sosial politik dan ekonomi. Indikasinya dapat ditemukan dengan meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan baik di wilayah domestik maupun publik, tingginya tingkat kemiskinan perempuan, menurunnya kesehatan ibu dan anak, ketidakadilan distribusi bantuan, serta minimnya perlindungan hukum bagi perempuan, yang kesemuanya berdampak pada kesejahteraan dan keberlangsungan masyarakat.

Pemberdayaan politik perempuan dibutuhkan agar kepentingan dan perspektif perempuan bisa diartikulasikan. Dalam hal ini, perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan di berbagai institusi tidak hanya bertindak sebagai kurir yang menyampaikan pesan, akan tetapi mereka sendirilah yang menjadi pesan tersebut. Ini sekaligus juga menghindari upaya sistematis yang meminggirkan peranan perempuan.

Aceh sebagiannya adalah sejarah pemberdayaan (*empowerment*) perempuan dalam politik, yang ditunjukkan dengan peran sentral sejumlah tokoh perempuan dalam politik formal di wilayah ini. Sebut saja beberapa, Ratu Nihrasiyah Rawangsa Khadiyu yang memimpin Kerajaan Islam Pasee, Sulthanah Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Johan Berdaulat, Sulthanah Sri Ratu Zakiatuddin, Sulthanah Sri Ratu Nurul Alam Naqiatuddin, Laksamana Malahayati, dan Laksamana Muda Cut Meurah Inseuen, Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, Pocut Baren, dan sebagainya. (Mardhiah Aly, 1980; Hasjmy, 1976)

Keberadaan perempuan-perempuan ini tentu saja harus juga dipahami dalam konteks di masa mereka masing-masing, termasuk sistem dan proses politik seperti apa yang waktu itu berlaku sehingga memungkinkan perempuan aktif dalam proses politik. Namun kemudian fakta kini telah membawa posisi perempuan ke titik terendah, dan perempuan butuh dilibatkan kembali dalam ruang politik di Aceh. Pemberdayaan (*empowerment*) perempuan menjadi penting untuk memastikan bahwa perempuan sebagai kelompok yang dominan dalam masyarakat tidak ditinggalkan dan dirugikan dalam pembangunan perdamaian dan transisi yang tengah berlangsung.

Meskipun beberapa klausul dalam UU Pemilu yang baru disahkan memberikan ruang bagi *affirmative action* untuk perempuan yaitu menyertakan 30% keterwakilan perempuan, tetapi ketentuan ini mendapat rintangan dari adanya berbagai ketentuan lain terkait dengan sistem Pemilu yang jauh lebih rumit dari Pemilu-Pemilu sebelumnya yang pernah dilaksanakan di Indonesia.

Pemilihan Umum legislatif 2014 di Aceh telah memberi gambaran awal bagaimana kaum perempuan banyak yang gagal dalam dunia politik. Meski setiap partai wajib mencalonkan sedikitnya 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah

pilihan, tapi faktanya menunjukkan bahwa perempuan hanya mendapatkan 8.8% dari 650 kursi yang diperebutkan. Demikian juga halnya untuk Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), perempuan hanya 14.8% atau sebanyak 12 perempuan yang mendapatkan kursi dari 81 kursi yang tersedia. Malah untuk empat (4) kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan 13 kursi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), kaum perempuan tidak terwakili dari Aceh. Ironis memang bila dilihat dari jumlah pemilih antara laki-laki dan perempuan di Aceh, pemilih perempuan melebihi 50% yaitu sebanyak 1.679.086 pemilih dan 1.635.288 pemilih laki-laki. Maka 12 orang terpilih atau 14.8% dari 81 kursi yang ada di DPRA, belumlah menunjukkan keterwakilan sebagaimana diatur Undang-Undang Pemilu. Begitu juga dengan DPR kabupaten /kota yang rata-rata cuma 8.8%. Dari program dan paradigma pemerintah tentang Pemberdayaan Perempuan, pemerintah memperlakukan isu-isu perempuan secara eksklusif hanya persoalan kesejahteraan dan bukan kesetaraan politik (Stiftung, 2005).

Table 1 : Persentase calon legislatif perempuan yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) di Aceh

No.	Kabupaten /Kota	Keterwakilan Perempuan di DPRK (%)
1	Sabang	25
2	Banda Aceh	3,4
3	Aceh Jaya	5
4	Aceh Barat	8
5	Aceh selatan	0
6	Singkil	8
7	Pidie	17,5
8	Pidie Jaya	4
9	Aceh Barat Daya	4
10	Sabulussalam	5
11	Gayo Lues	10
12	Aceh Tenggara	13,4
13	Bireuen	2,5
14	Lhokseumawe	8

15	Aceh Utara	2,2
16	Aceh Timur	10
17	Langsa	8
18	Aceh Tamiang	33,3
19	Aceh Besar	2,9
20	Benar Meriah	4
21	Aceh Tengah	6,7
22	Nagan Raya	16
23	Simeulue	10

Sumber data: Harian Serambi Indonesia tanggal 24 April 2014

Realitas awal yang berkembang dalam masyarakat Aceh, pemberdayaan (*empowerment*) perempuan sering hanya dimaknai sebagai penanggulangan kemiskinan, kesehatan ibu dan anak, dan perlindungan perempuan. Tidak jarang juga ini merujuk pada peran perempuan dalam keluarga sejahtera serta keluarga berencana. Organ-organ pemerintahan yang dibentuk untuk menangani persoalan perempuan, seperti Biro Pemberdayaan Perempuan atau Badan Pemberdayaan Perempuan, umumnya hanya dimandatkan untuk mengurus soal-soal ini.

Isu-isu tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam parlemen tentunya bermuara pada tingkat kepercayaan kaum perempuan itu sendiri terhadap kaumnya untuk ikut berpartisipasi dalam politik. Hal ini menjadi relevan untuk dikaji dalam kaitan dengan perlunya pemberdayaan (*empowerment*) perempuan dalam politik, dimana factor kemiskinan dan ketertinggalan ekonomi bagi perempuan, Nilai kultural dan interpretasi Islam yang sarat dengan muatan patriarkis dimana laki-laki lebih diutamakan daripada perempuan dalam keluarga, pengalaman traumatik selama konflik yang menahun, pesimisme ini semakin bertambah mengingat politik merupakan basis utama konflik, publikasi media massa serta keterbatasan mengalokasikan waktu dan tenaga untuk terlibat dalam politik di ruang publik juga dirasa penting untuk diketahui lebih mendalam. Sebagai sebuah mobilisasi, gerakan mengandalkan sepenuhnya pada dua hal: peran aktor atau institusi dan /atau

struktur kesempatan politik (McCarthy dan Zald, 1987; Tarrow, 1994). Sentralitas peran perempuan dalam keluarga dan rumah tangga terlihat dalam nilai dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. (Mansur. et.al, 1988).

Damai tidak mungkin dapat berlangsung jika perempuan ditinggalkan dalam pengambilan keputusan. Pemberdayaan (*empowerment*) perempuan mutlak dibutuhkan dan pemberdayaan (*empowerment*) ini harus ditempatkan dalam konteks transisi politik menuju demokrasi sebagaimana yang saat ini berlangsung di Aceh.

Pemberdayaan (*empowerment*) perempuan dalam politik sendiri sudah menjadi bagian dari identitas ke-Acehan, terutama di masa lalu. Di masa kini, pemberdayaan (*empowerment*) perempuan dalam politik dimungkinkan dengan terbukanya ruang-ruang kesempatan politik serta perubahan struktural dan kultural di masyarakat.

Akhirnya paparan diatas, menguraikan sejumlah fenomena yang diharapkan bisa dikaji dalam sebuah penelitian tentang Pemberdayaan (*empowerment*) Politik perempuan di Aceh, dengan berharap bahwa hal-hal ini dapat merumuskan bersama bentuk strategi untuk meningkatkan berdayanya perempuan dalam politik di masa mendatang dengan konteks kearifan local, dimana perempuan itu berada di wilayah Aceh. Tentu saja ini adalah usaha awal yang berkontribusi dalam meluaskan diskursus atas perlunya pemberdayaan (*empowerment*) politik perempuan dalam transisi demokrasi damai di Aceh. Awalan menjadi penting ketika kita memimpikan sebuah akhir yang bahagia bagi seluruh masyarakat Aceh.

Friedrich Ebert Stiftung (2005), menyatakan bahwa dari program dan paradigma pemerintah tentang pemberdayaan perempuan, pemerintah memperlakukan isu-isu perempuan secara eksklusif hanya persoalan kesejahteraan dan bukan kesetaraan politik. Maka dari itu, diharapkan temuan yang didapatkan nantinya bisa menghasilkan sebuah kebijakan model pemberdayaan politik

perempuan yang berbasis kearifan lokal bagi pemerintah dan bagi lembaga-lembaga terkait.

BAB II

ACEH DALAM LINTASAN SEJARAH

A. Aceh dan Sejarah Keberadaannya

Sejarah Aceh Utara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan Kerajaan Islam di pesisir Sumatera yaitu Samudera Pasai yang terletak di Kecamatan Samudera Geudong yang merupakan tempat pertama kehadiran Agama Islam di kawasan Asia Tenggara. Kerajaan-kerajaan Islam di Aceh mengalami pasang surut, mulai dari zaman Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, kedatangan Portugis ke Malaka pada tahun 1511 sehingga 10 tahun kemudian Samudera Pasai turut diduduki, hingga masa penjajahan Belanda.

Secara *de facto* Belanda menguasai Aceh pada tahun 1904, yaitu ketika Belanda dapat menguasai benteng pertahanan terakhir pejuang Aceh Kuta Glee di Batee Iliak di Samalanga. Dengan surat Keputusan Vander Geuvement General Van Nederland Indie tanggal 7 September 1934, Pemerintah Hindia Belanda membagi Daerah Aceh atas 6 (enam) *Afdeeling* (Kabupaten) yang dipimpin seorang *Asistent Resident*, salah satunya adalah *Afdeeling Noord Kust Van Aceh* (Kabupaten Aceh Utara) yang meliputi Aceh Utara sekarang ditambah Kecamatan Bandar Dua yang kini telah termasuk Kabupaten Pidie (Monografi Aceh Utara tahun 1986, BPS dan BAPPEDA Aceh Utara). *Afdeeling Noord Kust Aceh* dibagi dalam 3 (tiga) *Onder Afdeeling* (Kewedanaan) yang dikepalai seorang *Countroleur* (Wedana) yaitu :

1. Onder Afdeeling Bireuen
2. Onder Afdeeling Lhokseumawe
3. Onder Afdeeling Lhoksukon

Selain Onder Afdeeling tersebut terdapat juga beberapa Daerah Ulee Balang (Zelf Bestuur) yang dapat memerintah sendiri terhadap daerah dan rakyatnya yaitu Wee Balang Keuretoe, Geurogok, Jeumpa, dan Peusangan yang diketuai oleh Ampon Chik. Pada masa pendudukan Jepang istilah *Afdeeling* diganti dengan *Bun*, *Onder Afdeeling* disebut *Gun*, *Zelf Bestuur* disebut *Sun*, Mukim disebut *Kun* dan Gampong disebut *Kumi*. Sesudah Indonesia diproklamirkan sebagai Negara Merdeka, Aceh Utara disebut *Luhak* yang dikepalai oleh seorang Kepala Luhak sampai dengan tahun 1949.

Melalui Konfrensi Meja Bundar, pada 27 Desember 1949 Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari beberapa negara bagian. Salah satunya adalah Negara Bagian Sumatera Timur. Tokoh-tokoh Aceh saat itu tidak mengakui dan tidak tunduk pada RIS tetapi tetap tunduk pada Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Republik Indonesia Serikat kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berlaku Undang Undang Sementara 1950 seluruh negara bagian bergabung dan statusnya berubah menjadi propinsi. Aceh yang pada saat itu bukan negara bagian, digabungkan dengan Propinsi Sumatera Utara. Dengan Undang Undang Darurat Nomor 7 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom setingkat Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, terbentuklah Daerah Tingkat II Aceh Utara yang juga termasuk dalam wilayah Propinsi Sumatera Utara.

Gambar 2.1. Peta Kabupaten Aceh Utara



B. Geografis

Ibukota Kabupaten Aceh Utara kini bertempat di kota Lhoksukon seiring dikeluarkannya PP No.18 Tahun 2003 tentang pemindahan ibukota Aceh Utara ke Lhoksukon. Kabupaten ini terletak antara 96.52.00o – 97.31.00o Bujur Timur dan

04.46.00o – 05.00.40o Lintang Utara. Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 27 kecamatan yang terdiri dari 70 kemukiman dan 852 desa atau gampong.

Kabupaten Aceh Utara memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Lhokseumawe dan Selat Malaka
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah,
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, dan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bireuen.

Kabupaten Aceh Utara memiliki luas wilayah sebesar 3.296,86 km² dengan sebagian besar wilayah merupakan kecamatan Paya Bakong dengan

luas wilayah 418,32 km² dan kecamatan Sawang dengan luas wilayah 384,65 km². Sebagian besar wilayah Aceh Utara digunakan untuk lahan perkebunan, tegalan/kebun, dan sawah. Sebagian besar wilayah dalam Kabupaten Aceh Utara berada pada daerah dataran. Kisaran kelembaban nisbi rata-rata sepanjang tahun 2014 sebesar 73-86 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2013. Curah hujan berada dalam kisaran 19-573 mm dengan hari hujan antara 3-24 hari sepanjang tahun yang sama. Sepanjang tahun 2014, Kabupaten Aceh Utara mendapatkan sinar matahari sebanyak 35-85 persen dengan temperatur minimum 18,60C dan temperatur maksimum mencapai 34,20C. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik 4.1.1:

Tabel 2.1. : Luas Wilayah Kabupaten Aceh Utara Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase
1	Sawang	384,65	11,67
2	Nisam	42,74	3,48
3	Nisam Antara	84,38	2,56
4	Bandar Baro	42,35	1,28
5	Kuta Makmur	151,32	4,59
6	Simpang Keramat	79,78	2,42
7	Syamtalira Bayu	77,53	2,35
8	Geurudong Pase	269,28	8,17
9	Meurah Mulia	202,57	6,14
10	Matang Kuli	56,94	1,73
11	Paya Bakong	418,32	12,69
12	Pirak Timu	67,70	2,05
13	Cot Girek	189,00	5,73

14	Tanah Jambo Aye	162,98	4,94
15	Langkahan	150,52	4,98
16	Seunuddon	100,63	3,05
17	Baktiya	158,67	4,81
18	Baktiya Barat	83,08	2,52
19	Lhoksukon	243,00	7,37
20	Tanah Luas	30,64	0,93
21	Nibong	44,91	1,36
22	Samudera	43,28	1,31
23	Syamtalira Aron	28,13	0,85
24	Tanah Pasir	20,38	0,62
25	Lapan	19,27	0,58
26	Muara Batu	33,34	1,01
27	Dewantara	39,47	1,20
Kabupaten		3.296,86	100,00

Sumber Data : Aceh Utara Dalam Angka 2015

C. Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2: Tingkat Pendidikan Tahun 2014 Kabupaten Aceh Utara

Guru & Sekolah								
Status	Swasta				Negeri			
Tingkat	TK	SD & Mi	SMP & MTs	SMA & Ma	TK	SD & Mi	SMP & MTs	SMA & Ma
Jumlah guru	581	203	963	578	83	6545	2343	1781
Jumlah murid	5122	2165	5493	3218	784	77906	25775	20878

Jumlah sekolah	122	15	53	30	9	384	85	46
-----------------------	-----	----	----	----	---	-----	----	----

Sumber Data : Aceh Utara dalam Angka 2014.

D. Agama

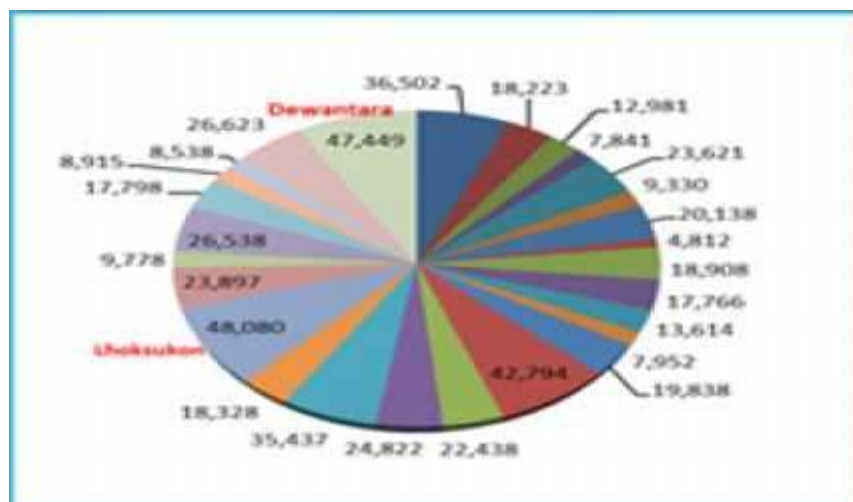
Tabel 2.3: Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2014 Kabupaten Aceh Utara

Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama.				
No	Agama	2012	2013	2014
1	Islam	564,809	610,124	527,611
2	Katolik	38	48	58
3	Protestan	19	25	27
4	Hindu	11	13	9
5	Budha	28	28	79
Total		564,905	610,238	527,784

Sumber Data : Aceh Utara dalam angka 2014

E. Data Penduduk kabupaten Aceh Utara

Grafik 2.1 : Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Utara Berdasarkan Kecamatan Tahun 2014



F. Pemilih dalam Pemilu Calon Legislatif tahun 2014

Tabel 4. 4. : Jumlah Pemilih Per/Kecamatan

No	Kecamatan	Desa	TPS	Laki-laki	Perempua
1.	Baktiya	57	79	11.570	12.178
2.	Baktiya Barat	26	38	6.028	6.376
3.	Banda Baro	9	18	2.865	3.149
4.	Cot Girek	24	41	6.958	7.089
5.	Dewantara	15	79	16.967	17.429
6.	Geuredong Pase	11	12	1.704	1.707
7.	Kuta Makmur	39	52	6.606	7.009
8.	Langkahan	23	43	7.369	7.630
9.	Lapan	11	20	3.014	3.288
10.	Lhoksukon	75	105	15.926	16.113
11.	Matang Kuli	49	523	5.598	5.868
12.	Murah Mulia	50	54	6.474	6.852
13.	Muara Batu	24	48	8.670	9.355
14.	Nibong	20	27	2.722	2.949
15.	Nisam	29	41	6.257	6.622
16.	Nisam Antara	6	20	4.254	4.373
17.	Paya Bakong	39	40	4.065	4.368
18.	Pirak Timur	23	23	2.466	2.586
19.	Samudera	40	59	8.824	9.334
20.	Sawan	39	69	11.710	12.594
21.	Seunuddon	33	50	7.928	8.374
22.	Simpang Kramat	16	21	2.747	2.764
23.	Syamtalira Aron	34	41	6.061	6.449
24.	Syamtalira Bayu	38	49	7.020	7.072
25.	Tanah Jambo Aye	47	80	10.114	10.810
26.	Tanah Luas	57	65	7.428	7.963
27.	Tanah Pasir	18	21	2.911	3.228

Sumber Data: KIP Aceh Utara 2014.

Dari data diatas menunjukkan jumlah desa keseluruhan sebanyak 852 desa, dan jumlah TPS sebanyak 1.248, dan jumlah pemilih laki-laki 189.710, dan jumlah

pemilih perempuan sebanyak 198.958 dan total pemilih keseluruhan di Kabupaten Aceh Utara adalah 388.668 jiwa.

BAB III

HAMPARAN METODOLOGI

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Aceh Utara, Aceh, dipilih berdasarkan angka satu perempuan (2,2%) dari 45 kursi yang disediakan di DPRK Aceh Utara. Hal ini tentunya menjadi kekuatan dalam meneliti factor-faktor penyebab dan kelemahan perempuan dalam pemahaman politik baik dari segi structural maupun kultural dengan memperlihatkan ketidakmampuan perempuan mengutuskan wakil perempuan di parlemen untuk keterwakilannya. Dimana data pemilih menunjukkan jumlah pemilih perempuan melebihi 50% dari jumlah pemilih laki-laki di kabupaten tersebut. (total pemilih keseluruhan 389.061 dengan jumlah pemilih laki-laki 189.915, dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 199.146).

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswel (1994), kualitatif bersifat deskriptif, yakni berusaha menggambarkan gejala atau hubungan gejala-gejala yang dijumpai dalam pengamatan selama dilapangan. Metode/jenis penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang pemberdayaan politik bagi perempuan di Kabupaten Aceh Utara.

B. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini maka digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

Data primer diperoleh berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara kepada informan-informan, khususnya perempuan, masyarakat dan *stakeholder* lainnya (Pemerintah daerah, tokoh masyarakat setempat). Peneliti menentukan sendiri informan yang diambil berdasarkan teknik *purposive*, yaitu pengambilan informan didasarkan pada pilihan penelitian tentang aspek apa dan siapa yang akan dijadikan fokus pada saat situasi tertentu dan saat ini terus menerus sepanjang penelitian (Sugiyono, 2004:129). Selanjutnya data sekunder diperoleh dari gambar dan bacaan berupa buku-buku, makalah, jurnal penelitian yang berkenaan dengan penelitian.

Data selanjutnya dibahas dan diskusikan dalam kelompok diskusi (FGD) secara partisipatif, transek, observatif dan mendalam antara tim peneliti dan informan. Dari kegiatan ini diharapkan diperoleh gambaran lebih mendalam lagi mengenai kondisi karakteristik pemilih perempuan di kabupaten Aceh Utara. Hal ini berkenaan dengan structural dan kultural dan tingkat pemahaman politik kaum perempuan dalam keterlibatannya pada lembaga-lembaga dan institusi politik secara komprehensif, potensi yang dimiliki, masalah dan kendala serta alternatif pemecahan masalah sesuai kebutuhan masyarakat itu sendiri. Prosedur yang dipakai dalam pengambilan data primer adalah peneliti hanya mencatat informasi sesuai realitanya. Interpretasi peneliti terhadap informasi yang diperoleh sedapat mungkin dihindari. Interpretasi dilakukan saat analisa data dan pembahasan FGD.

C. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik analisis data dengan model interaktif. Model ini terdiri dari tiga hal utama menurut Miles dan Huberman

dalam Idrus (2009: 147- 151) yaitu (1) Reduksi data ; proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. (2) Penyajian data ; sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (3) Penarikan kesimpulan/verifikasi ; penarikan arti data yang telah ditampilkan. Peneliti dapat saja melakukan verifikasi hasil temuan kembali dilapangan. Dengan begitu, kesimpulan yang diambil dapat sebagai pemicu peneliti untuk lebih memperdalam lagi proses observasi dan wawancaranya, serta menggunakan literatur yang ada dan diklarifikasikan dengan FGD.

D. Luaran yang Ingin Dicapai

Penelitian tahap kedua ini diharapkan melahirkan *output/outcome* gambaran strategi pemberdayaan politik perempuan sesuai dengan konteks kearifan local, yang pada akhirnya munculnya partisipasi politik perempuan agar kepentingan dan perspektif perempuan bisa diartikulasikan. Terutama keterlibatan dan peranan dalam pengambilan keputusan di berbagai institusi termasuk di pemilihan umum. Dengan meliputi:

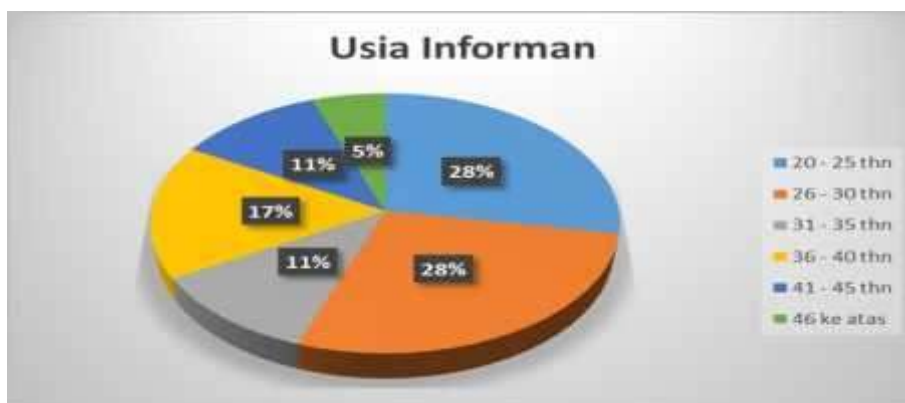
1. Tersusunnya pola strategi pemberdayaan politik perempuan baik bidang structural dan juga kultural yang sesuai dengan potensi lokal dalam upaya meningkatkan peranan perempuan dalam bidang politik.
2. Implementasi strategi pemberdayaan politik perempuan.
3. Fungsi, peran dan partisipasi serta rasa percaya diri kaum perempuan sebagai kekuatan politik yang akan menjadi kekuatan daerah dan nasional, baik

pengambil dan pembela kebijakan peningkatan kesejahteraan perempuan dan masyarakat.

E. Karakteristik Informan

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 36 informan dengan masing-masing 3 informan yang tersebar di 12 Desa dalam Kabupaten Aceh Utara, yang meliputi 7 (tujuh) Kecamatan dalam 6 wilayah pemilihan yang dikelompokkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara yaitu Kecamatan Dewantara, Kecamatan Kuta Makmur, Kecamatan Samudera, Kecamatan Nibong, Kecamatan Tanah Jambo Aye dan Lhoksukon. Sebagaimana lazimnya dalam penelitian kualitatif, jumlah informan tidak ditetapkan sebelum penelitian dilakukan, tetapi ditetapkan setelah mendapatkan pola, untuk penelitian ini terutama menyangkut kecenderungan perilaku kaum perempuan dalam memilih wakilnya di lembaga legislative kabupaten Aceh Utara tahun 2014.

Grafik 3.1 : karakteristik Informan Berdasarkan Usia



Pemilihan karakteristik informan dilakukan berdasarkan banyaknya jumlah pemilih perempuan di sebuah desa/gampong yang dijadikan lokasi tempat informan dan pertimbangan lainnya seperti usia, pekerjaan dan tingkat pendidikan. Hal ini dianggap termasuk dalam bagian faktor-faktor yang ikut memengaruhi orientasi terhadap kaum perempuan dalam memilih.

Dari grafik 3.1, terlihat informan yang berasal dari 12 Gampong / desa yang diwawancarai dimulai dari usia dari 22 tahun sampai 50 tahun. Hal ini terlihat dari grafik di atas, dimana Informan yang berusia antara 20 tahun – 25 tahun dan 25 - 30 tahun lebih banyak yang bersedia menjadi informan dari keseluruhan rentang usia informan yaitu sebanyak 20 orang atau 55.56 persen, selanjutnya diikuti usia 30 – 35 tahun sebanyak 6 orang atau 16.67 persen. Sedangkan untuk usia 31 – 35 tahun dan usia 41 – 45 tahun masing-masing sebanyak 4 orang atau 11.11 persen.

Terakhir, interval usia 46 ke atas sebanyak dua orang atau 5.56 persen, paling kecil dari keseluruhan informan. Dari hasil pemilihan informan dengan teknik random dan juga purposive, dimana informan terpilih dengan acak dan kemudian membentuk struktur usia, dimana semuanya merupakan informan yang sudah punya hak pilih dalam pemilu legislative 2014 dengan komposisi usia seperti di atas.

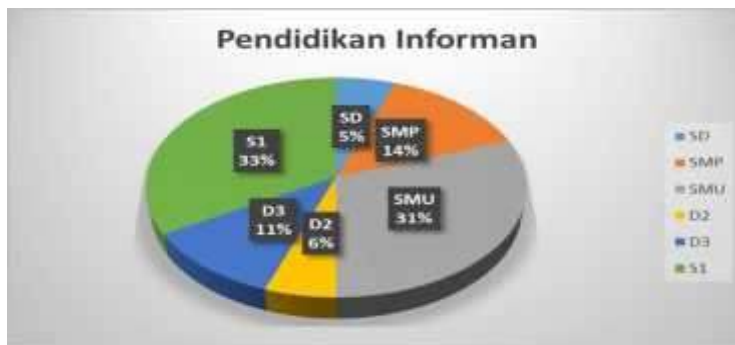
Grafik 3.2. : Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan



Grafik 3.2 memperlihatkan bahwa dari 36 informan yang diwawancarai, sepertiga atau 33 persen (12 orang) bekerja sebagai ibu rumah tangga, tidak memiliki pekerjaan lain sebagai wanita karir. Sebanyak 11 orang atau 31 persen bekerja sebagai guru atau pegawai negeri sipil (PNS), 6 informan atau 17 persen bekerja sebagai wira usaha, 3 informan (8 persen) sebagai Swasta, 2 informan (6 persen) sebagai tenaga kesehatan, dan sisanya sebanyak dua orang (5 persen) Mahasiswi.

Kendati bekerja dengan berbagai profesi, semua informan didapati dengan acak bagi kaum perempuan dalam masyarakat desa tanpa penetapan sebelumnya akan kriteria khusus bidang pekerjaan. Namun demikian penetapan yang telah mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum menjadi tujuan dalam menetapkan informan yang didapati dalam masyarakat. Walaupun beberapa kendala didapati dalam penyesuaian pertanyaan yang tidak dimengerti serta hanya diberi jawaban singkat ketika proses wawancara di jalankan. Pekerjaan sejumlah informan yang PNS kemudian diharapkan akan mendapati informan yang cerdas dalam menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pemahaman politik serta pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mendalam.

Grafik 3.2.: Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Pada grafik 3.2 pula terlihat sebagian besar informan berpendidikan terakhir sarjana, yakni sejumlah 12 informan atau mencapai 33 persen. Kemudian informan yang berpendidikan SMU sejumlah 11 informan atau 31 persen, SLTP sebanyak 5 informan atau 14 persen. Untuk pendidikan D3 sebanyak 4 informan atau 11 persen dan untuk pendidikan D2 dan Sekolah Dasar masing-masing 2 informan atau 5 – 6 persen. Banyaknya informan yang berpendidikan terakhir Sarjana dikarenakan faktor pendidikan tinggi dianggap telah mengerti dan memahami tentang peranan perempuan dalam ranah politik.

Beberapa informan lainnya adalah Ibu Riyanti adalah satu-satunya anggota perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara, Ibu Naimah kepala Dinas Pemberdayaan Wanita, 2 anggota dari partai politik lokal dan 1 dari partai politik Nasional.

BAB IV

DISKURSUS FEMINISME DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ACEH

A. Feminisme

Isu feminis selalu dikaitkan dengan isu persamaan hak dan kesetaraan gender. Namun, isu yang diangkat oleh feminis lebih dari itu. Dalam teori kontemporer, perhatian tidak lagi dipusatkan pada kehidupan perempuan, melainkan meluas ke arah analisis gender. Bagaimana pengaruh gender dalam kehidupan social manusia. Jika kita mampu melihat dengan jeli, politik internasional dan hubungan internasional hanya dipegang oleh lelaki. Perempuan tidak banyak terlibat dalam mengambil keputusan dan membentuk pola politik.

Feminisme menurut Sadli (2002) adalah sebagai suatu gerakan politis yang dikenal sebagai gerakan kaum suffrage, yang bertujuan untuk memajukan kaum perempuan, baik kondisi kehidupannya maupun status dan perannya. feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan. Feminisme adalah gerakan kaum perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. (Najmah dan Khatimah sa'ida, 2003; Mazdafiah 2004; Maharani 2004). Selanjutnya pengertian feminisme dapat berubah dikarenakan oleh pemahaman atau pandangan para feminis yang didasarkan atas realita secara historis dan budaya, serta tingkat kesadaran persepsi dan perilaku.

B. Pemberdayaan

Empowerment yang dalam bahasa Indonesia berarti “pemberdayaan”, adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran

masyarakat kebudayaan Barat, utamanya Eropa. Memahami konsep *empowerment* secara tepat harus memahami latar belakang kontekstual yang melahirkannya. Konsep *empowerment* mulai nampak sekitar dekade 70-an dan terus berkembang hingga 1990-an (Pranarka & Vidhyandika, 1996).

Definisi pemberdayaan dalam arti sempit, yang berkaitan dengan sistem pengajaran antara lain dikemukakan oleh Merriam Webster dan *Oxford English Dictionary* kata "*empower*" mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power of authority* dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*. dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan, dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.

Proses pemberdayaan dalam konteks aktualisasi diri adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan individu dengan menggali segala potensi yang dimiliki oleh individu tersebut baik menurut kemampuan keahlian (*skill*) ataupun pengetahuan (*knowledge*). Pranaka dan Moeljanto (1996) melihat konsep pemberdayaan (*empowerment*) perlu upaya mengaktualisasikan sesuai dengan alam pikiran dan kebudayaan sendiri. Intinya pemberdayaan adalah membantu klien untuk memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial.

Sebagai suatu strategi pembangunan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai kegiatan membantu klien untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui

peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya (payne, 1997: 266).

Ife (1995) memberikan batasan pemberdayaan sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka. Lebih lanjut, sutrisno (2000:185) menjelaskan, dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. perbedaannya dengan pembangunan partisipatif adalah keterlibatan kelompok masyarakat sebatas pada pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan program, sedangkan dana tetap dikuasai oleh pemerintah.

Meskipun rumusan konsep pemberdayaan berbeda-beda antara ahli yang satu dengan yang lainnya, tetapi pada intinya dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebagai upaya berencana yang dirancang untuk merubah atau melakukan pembaharuan pada suatu komunitas atau masyarakat dari kondisi ketidakberdayaan menjadi berdaya dengan menitikberatkan pada pembinaan potensi dan kemandirian masyarakat. Dengan demikian mereka diharapkan mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam menentukan masa depan mereka, dimana *provider* dari pemerintah dan lembaga *non government organization/NGO* hanya mengambil posisi partisipan, stimulan, dan motivator. Tentunya dalam hal ini adalah pemberdayaan (*empowerment*) politik perempuan yang selama ini menjadi lemah dan tidak banyak berpartisipasi dalam politik di Aceh.

Dari tujuan yang ingin dicapai, pemberdayaan untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Dimana kemandirian yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan mengerahkan sumberdaya yang di miliki oleh lingkungan internal (Ambar Teguh S, 2004:80-81)

Dalam tahapan pemberdayaan menurut Sumodingningrat (2004:41) tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Teguh S, (2004) menyatakan beberapa tahapan yang harus dilalui tersebut meliputi: (1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. (2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. (3) Tahap peningkatan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mehantarkan pada kemandirian.

C. Pemberdayaan Perempuan

Dalam konteks pemberdayaan perempuan, menurut Nugroho (2008: 164), tujuan dari program pemberdayaan perempuan adalah : *Pertama*, meningkatkan

kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (*subject*) agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini, *Kedua*, meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap system manajemen baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan, *Ketiga*, meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola manajemen skala kecil maupun besar untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri, *Keempat*, meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan.

Selanjutnya Nugroho (2008) menawarkan program-program pemberdayaan perempuan yang meliputi: *Pertama*, penguatan organisasi kelompok perempuan di segala tingkat mulai dari kampung hingga nasional. Penguatan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan lembaga agar dapat berperan aktif sebagai perencana, pelaksana, maupun pengontrol. *Kedua*, peningkatan fungsi dan peran organisasi perempuan dalam pemasaran sosial program-program pemberdayaan. Hal ini penting mengingat selama ini program pemberdayaan yang ada, kurang disosialisasikan dan kurang melibatkan peran masyarakat. *Ketiga*, pelibatan kelompok perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring semua program pembangunan yang ada. Keterlibatan perempuan meliputi program pembangunan fisik, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan pengetahuan politik. *Keempat*, peningkatan kemampuan kepemimpinan perempuan, agar mempunyai posisi tawar yang setara serta memiliki akses dan peluang untuk terlibat dalam pembangunan, *Kelima*, peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan

Pemberdayaan menjadi strategi penting dalam peningkatan peran dan peluang perempuan dalam meningkatkan partisipasi politikya serta merupakan upaya peningkatan dan pengaktualisasian potensi diri mereka agar lebih mampu mandiri dan berkarya.

BAB V

STRUKTURAL DAN KULTURAL PEREMPUAN ACEH DALAM POLITIK

A. Karakteristik Alasan Berkenaan Dengan Struktural Dan Kultural Masyarakat.

Segmentasi perempuan merupakan salah satu strategi dalam mengelola pemilih perempuan yang sangat heterogen. Pemilih perempuan adalah kelompok sasaran strategis karena jumlah mereka yang lebih banyak dibandingkan pemilih laki-laki di kabupaten Aceh Utara. Jumlah pemilih perempuan 198.958 jiwa (51.2%), dan pemilih laki-laki berjumlah 189.710 jiwa (48.8%), dengan total pemilih kabupaten Aceh Utara sebanyak 388.668 jiwa.

Oleh Karena itu, dalam pemilu legislative tahun 2014 di kabupaten Aceh Utara, pemilih dari segmen Perempuan mendapatkan perhatian dari calon legislatif (caleg). Hasil observasi, beberapa calon legislatif (caleg) berusaha meraih simpati Perempuan dengan menggelar pertemuan bersama kelompok-kelompok perempuan dalam masyarakat dan menyampaikan visi dan misi kepada mereka. Perempuan yang hadir dalam pertemuan tersebut mendapatkan kompensasi langsung, seperti kain sarung, kerudung dan juga bantuan tunai. Calon legislatif (caleg) menggunakan jaringan di dalam kelompok tersebut untuk mengumpulkan para anggota. Untuk terlaksananya pertemuan tersebut, calon legislatif (caleg) atau partai politik yang mengusung calon legislatif (caleg), sudah harus mengeluarkan biaya tertentu, misalnya untuk makan dan minum peserta.

Dari 36 informan awal yang diwawancarai dalam penelitian ini, ada yang tidak berani memberikan informasi terperinci dikarenakan pertanyaan dianggap memasuki wilayah politik, dimana kebanyakan informan tidak menyukai untuk membahasnya.

Oleh karena itu pertanyaan disesuaikan dalam proses wawancara melalui perbincangan alamiah. Dengan strategi ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang sesuai aslinya, tanpa adanya pemalsuan informasi dari informan untuk tujuan tertentu. Walaupun didapati dalam beberapa kasus, beberapa informan memberikan informasi yang serupa dengan informan sebelumnya.

Wawancara menggunakan daftar pertanyaan tertulis sebagai pedoman. Namun, di lapangan dilakukan pengembangan sesuai dengan informasi yang disampaikan informan sehingga banyak informasi yang tidak seluruhnya menjawab pertanyaan dalam pedoman wawancara, melainkan menambah beberapa pertanyaan menyangkut alasan dan pemahaman politik kaum perempuan di kabupaten Aceh Utara.

Dari 36 informan yang diwawancarai dengan pertanyaan mengenai lebih memilih calon legislatif laki-laki atau perempuan. Sebanyak 30 informan menjawab lebih percaya kepada laki-laki dan 5 informan kepada perempuan dan 1 informan boleh kedua-duanya. Informan menjawab cenderung lebih percaya kepada laki-laki dari pada perempuan, memberi alasan bahwa calon legislatif (caleg) laki-laki lebih cocok, lebih berhak, handal sebagai pemimpin, logis dan tidak memakai perasaan, banyak wawasan, bertanggung jawab, tegas, kokoh sesuai perintah agama dan lebih baik dalam mempertahankan dan mengamankan negara, dibandingkan calon legislatif (caleg) perempuan. Sedangkan yang memilih perempuan dalam pemilu legislatif mempunyai alasan bahwa perempuan lebih memahami sesama perempuan, lebih komunikatif dengan perempuan dan juga peka pada situasi serta perempuan. Kendati demikian dalam beberapa jawaban yang lebih mendalam, informan tidak berani mengeluarkan argumennya secara panjang karena takut akan ranah politik yang mereka bicarakan bisa berdampak negatif terhadap kehidupan

sosialnya. Dari wawancara dengan informan, diperoleh beberapa alasan spesifik berkenaan structural dan kultural.

1. Faktor Struktural

Struktur sosial adalah suatu rangkaian kompleks dari relasi-relasi sosial yang berwujud dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, struktur sosial meliputi relasi sosial di antara para individu dan perbedaan individu dan kelas sosial menurut peranan sosial mereka. Dalam bagian ini, peneliti ingin melihat karakteristik alasan yang disebabkan oleh pengaruh dan peranan secara struktur sosial dalam masyarakat terhadap pilihannya pada seseorang calon legislative dari kaum perempuan. Hal ini tentunya dimulai dari sebuah keluarga sampai dengan lingkungan kehidupan sosial.

Peran suami atau pihak lain dalam penentuan pilihan	
Alasan 1	Peran suami dan keluarga mempengaruhi pilihan, dalam bentuk arahan, saran, komentar, dan gambaran kandidat
Alasan 2	Demokrasi dalam keluarga dan tidak campur tangan dalam memilih.
Alasan 3	Belum bersuami jadi banyak masukan dari orang tua atau abang

Dalam melihat peran pihak lain dalam proses penentuan pilihan, 16 informan berpendapat bahwa suami dan keluarga sangat berperan dalam memberikan

arahan, saran dan juga memberikan komentar terhadap calon yang akan dipilih. Dan ini mengarah pada calon laki-laki daripada perempuan. Secara definitive, struktur social dalam sebuah keluarga menjadi skema penempatan nilai-nilai social pada sentral kepala keluarga. Intervensi yang mendasar pada siapa yang dipilih mungkin tidak banyak lagi berlaku untuk sebuah keluarga yang demokratis, akan tetapi saran dan arahan kadang secara tidak langsung mencoba mengunci jawaban dari sebuah pilihan seperti pernyataan Ibu Mulyana S.Pdi dari Kecamatan Smpang Kramat : ...” *tentu ada,mungkin jangan terlalu berharap apa yang dijanjikan...*”. Pernyataan senada juga disampaikan oleh Ibu Elly Sukria (35thn) dari gampong Keude Geudong:” *Arahan ada, karena apabila diarahkan mengenai si A dan si B...mana yang lebih baik....*”.

Selanjutnya 13 informan tidak dipengaruhi untuk memilih siapa yang diinginkan dan diberi demokrasi dalam keluarga. Namun pada informan yang belum berkeluarga terdapat 7 informan yang menyatakan bahwa mereka dipengaruhi oleh orang tua atau kakak ataupun abang dan kawan-kawan berkumpul.

Peran kedudukan/Jabatan	
Alasan 1	Dari kedudukan dalam masyarakat dan keluarga, informan lebih memilih percaya yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, dipercaya lebih mampu, banyak pengaruh, berwawasan, berkarakter dan punya pengaruh.
Alasan 2	Tidak terpengaruh dengan kedudukan akan tetapi lebih kepada kepribadian, pengalaman dan

	komunikatif
--	-------------

Dari hasil wawancara pada faktor kedudukan dalam masyarakat bagi calon yang akan dipilih, 22 informan menyatakan bahwa dalam memilih informan percaya dengan pengaruh yang mempunyai kedudukan atau jabatan dalam masyarakat. Ini karena para informan merasakan bahwa dengan adanya kedudukan dalam masyarakat dan keluarga, gambaran calon lebih mampu dan punya pengaruhnya. Seseorang yang punya kedudukan atau jabatan dalam masyarakat juga akan berpendapat atas kepentingan yang baik dan berwawasan yang luas terhadap segala persoalan masyarakat.

Namun 14 informan lainnya menyatakan bahwa kedudukan dalam masyarakat bukan hal yang penting untuk diterima. Ini karena yang lebih utama adalah kepribadian dan keramah-tamahan, wibawa, pengalaman dan komunikatif dalam masyarakat akan lebih baik dan menjadi ukuran untuk menjadi pertimbangan.

Pendidikan	
Alasan 1	Pendidikan menjadi penting, informan melihat yang mempunyai pendidikan lebih mampu memimpin, memahami masyarakat, dan memberi kemajuan kepada daerah
Alasan 2	Lebih kepada kekayaan dan ramah tamah

Dari hasil wawancara pada faktor pentingnya pendidikan bagi calon yang akan dipilih, 30 informan menyatakan bahwa mempunyai pendidikan akan lebih mampu memimpin, mampu memahami masyarakat, dan dapat mengubah serta membangun daerah. Selanjutnya 6 informan lainnya menyatakan bahwa kekayaan lah yang lebih penting bagi seorang calon legislative.

Relasi-relasi sosial yang berwujud dalam suatu struktur masyarakat juga terjadi pada tingkat pendidikan di masyarakat, dimana yang berpendidikan tinggi lebih bisa menjelaskan kesinambungan antara teori dengan logika dan realita. Namun demikian, fenomena struktur social juga membuka lapisan pada kekayaan menjadi salah satu lapisan struktur dalam masyarakat . oleh karena itu, masih banyak juga masyarakat yang mengikuti atau mendengar arahan atau masukan dari orang-orang kaya, terutama yang ramah dalam masyarakat seperti pernyataan ibu Siti Arafah (27 thn) dari Kec. Nibong: *“kalau untuk perempuan sih, kita bilang untuk kekayaan bisa juga untuk pengaruh untuk dia.....”*.

Factor reputasi	
Alasan 1	Calon legislative dari kaum wanita kurang dipercayai dalam hal reputasi karena strata keseharian dalam masyarakat, dan tidak terkenal.
Alasan 2	Dipercayai dalam aplikatif reputasi kaum perempuan mudah berbaur, aktif dalam masyarakat, memenuhi janji dan setia dan pintar serta berpengalaman

Dari hasil wawancara berkenaan dengan reputasi calon yang dipilih, 23 informan menyatakan bahwa kurang percaya terhadap calon legislatif perempuan untuk dipilih. Hal ini dikarenakan beberapa informan menyatakan bahwa melihat keseharian perempuan di lingkungan masyarakat, tidak yakin untuk bisa tegas dan kuat dalam berjuang dalam gedung parlemen di Aceh. Berikut petikan wawancara dari beberapa informan yang tidak percaya pada calon perempuan:

“...Saya tidak percaya pada Caleg perempuan karena perempuan itu cocoknya di rumah bukan diranah politik...(Zea Noviana, 25thn, samakurok)...”

“...Saya kurang percaya pada Caleg perempuan dengan alasan bahwa Caleg perempuan banyak yang tidak bisa berpolitik ...”(Susiana, 27thn, Mns.Tutong)

“.... Saya tidak percaya sepenuhnya akan tetapi lebih baiknya pemimpin itu ya berasal dari laki –laki ..(Hj. Marwani, 45thn, Mns.Tutong)

“.. Bagi saya Caleg perempuan itu kurang baik, jadi Perempuan itu tidak perlu menjadi Caleg (Cut Fitriana, 25thn, Tring Matang Ubi)

“..... Belum sepenuhnya percaya karna janjinya ada yang belum ditepati (Aywasari, 25thn, Tambon Tunong).

Sebaliknya 8 informan malah percaya dengan reputasi perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan mudah berbaur, setia dan sabar. Namun demikian itu juga harus didukung oleh kepandaian dan pengalaman yang mapan, aktif dalam masyarakat dan juga memenuhi janji politiknya pada masyarakat. Berikut beberapa pernyataan ibu-ibu yang percaya akan reputasi perempuan di Aceh:

“percaya tapi kalau dia bisa mengayomi masyarakat ya...”percaya pada perempuan yang pintar, jujur dan punya pengalaman....”. Mayoritas perempuan itu tipe yang setia jadi biasanya janji ...”(Elly Sukria, 35thn, Keude Geudong).

“...perempuan itu bisa dipercaya bila dibandingkan laki – laki..”(Raudhatul Jannah, 26thn, Samakurok).

“.... Caleg mereka aktif dalam masyarakat, ada perkumpulan di PKK itu yang bisa dipercaya (Shindiana, 33thn, Tambon Tunong).

Reputasi adalah hal yang dipertahankan guna menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan kaum perempuan untuk memperjuangkan hak-hak kaumnya di segala bidang. Namun demikian gambaran hasil wawancara di atas mendapati bahwa persoalan reputasi masih kurang mendapat penghargaan dari masyarakat untuk mengangkat lebih banyak lagi perwakilannya dalam parlemen di Aceh. Tentunya dukungan yang banyak dan juga peningkatan minat harus di upayakan untuk bisa mewujudkan terpenuhinya keterwakilan jumlah perempuan dalam bidang politik di Aceh.

Di kabupaten Aceh Utara hal ini juga terjadi dimana keterwakilan perempuan hanya 1 orang di parlemen dari beberapa kursi yang disediakan untuk kaum perempuan. Berikut ini beberapa jawaban dari informan dalam melihat bagaimana solusi terhadap meningkatnya keterwakilan di parlemen.

Dukungan terhadap banyaknya perempuan di parlemen untuk menyuarakan aspirasi perempuan	
Alasan 1	Calon haruslah Belajar Politik lebih mendalam, menyesuaikan diri dengan masyarakat, punya wawasan luas, kerjaama dengan ormas, lsm bahkan dengan elemen masyarakat lainnya, dan mencalonkan diri lebih banyak lagi.
Alasan 2	Tidak cocok perempuan di parlemen dan aspirasi perempuan tidak mesti disampaikan oleh kaum perempuan.

Dari hasil wawancara dengan 36 informan yang tersebar di 6 kecamatan di Aceh Utara, beberapa informan dari 33 informan yang mendukung, memberi alasan dan pendapatnya untuk meningkatnya kaum perempuan dalam ranah politik diantaranya:

“Mungkin lebih banyak berbaur dengan masyarakat ”.(Rosmiati, 36thn, Paloh Lada).

“Perempuan yang mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat, jangan hanya ketika kampanye datang datang menemui masyarakat. lalu pilihlah tim pemenangnya orang yang lebih dapat dipercaya.” (Elli Farida, 50thn, Paloh Lada).

“Harus lebih memberanikan diri” (Idawani, 30thn, Simpang Kramat).

“Lebih berbaur dengan masyarakat agar dapat memahami lebih tentang perempuan-perempuan”.(Micha Yuspasari, 22thn, Nibong).

“Belajar lah politik dengan baik tingktkan kepercayaan kepada masyarakat.(Elfi Susanti, 29thn, Keude Geudong).

“ Ya mungkin harus banyak caleg dari perempuan (Marliah, 37thn, Sumbok Rayeuek).

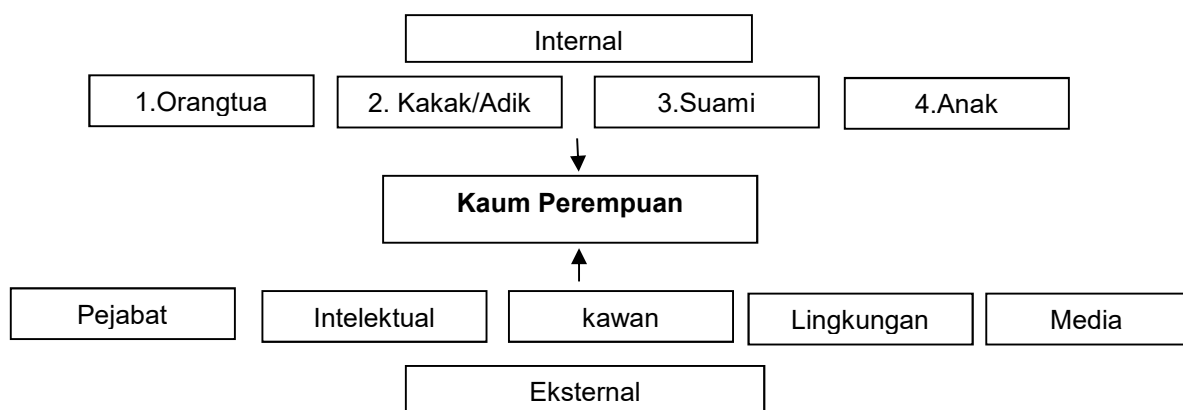
“Harus lebih aktif dan masuk partai”. (Resti Maria, 30thn, Rawang Itek).

Namun demikian, 6 informan memberikan pendapat yang berbeda dengan di atas. Beberapa informan merasa tidak mahu tahu tentang pentingnya keterwakilan perempuan untuk menampung aspirasi kaum perempuan di parlemen. Hal ini seperti pendapat informan berikut ini: *“ Saya tidak tahu” (Zea Noviana, 25thn, Sama Kurok), “Saya tidak tahu karena bagi saya perempuan itu tidak cocok berada di parlemen..”(Hj. Marwati, 45thn, Mns.Tutong) atau “Aspirasi perempuan itu tidak harus disampaikan oleh kaum perempuan “ (Raudhatul Jannah, 26thn, Sama Kurok).*

Berdasarkan hasil di atas, secara structural sendiri sumber acuan kaum perempuan dalam memilih terdapat dari internal dan eksternal. Hal ini sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh informan, baik secara formal *interview* maupun diskusi non-formal. Demikian sesuai dengan pernyataan seorang informan dari

Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara; “*Saya Belum bersuami tapi mungkin ikut keluarga atau ikut kawan-kawan aja.*” Informan tersebut menjadikan keluarga (ayah, ibu dan abang serta adik) dan kawan-kawannya sebagai sumber acuan selain dia juga bisa memakai pendapat diri sendiri disebabkan belum bekeluarga.

Secara struktural terbentuk jaringan yang dapat mempengaruhi pilihan kaum perempuan, baik berada dalam ranah internal mahupun ranah eksternal di lingkungan masyarakat, terlihat dalam gambar di bawah ini:



Saran, masukan, gambaran menjadi arahan rekomendasi dari kalangan internal yaitu orang tua, kakak/adik, suami dan Anak. Sedangkan dari kalangan eksternal terdiri dari tokoh masyarakat seperti kepala desa (*keuchik*) dan *teungku imum*, rekan sekerja bagi informan yang memiliki karir di luar pekerjaan mengurus rumah tangga, kelompok penekan dari calon legislatif (caleg) atau partai politik, media massa, maupun dari komunitas tempat Perempuan bergabung.

2. Faktor Kultural

Terlepas dari pengaruh structural, kultural tentunya juga menjadi bagian yang mempengaruhi kaum perempuan di Aceh untuk menentukan pilihannya terhadap perempuan sebagai perwakilannya di parlemen. Aceh yang bersyariat Islam

sekarang ini, tentunya memberi warna baru terhadap peranan perempuan dalam masyarakat. Hal ini tentu berbeda dengan sejarah perjuangan di Aceh, yang mengakui akan keterlibatan perempuan di kancah politik. Sebut saja Laksamana Malahayati, Cut Nyak Dien dan lainnya. Hasil pemilu legislative tahun 2014 lalu masih menjadi kajian tentang peranan politik perempuan di Aceh, tentunya budaya juga berpengaruh pada respon kaum perempuan di Aceh untuk mempercayai dan kemudian memilih perempuan sebagai wakilnya di perlemen.

Memulai wawancara di bagian kultural, peneliti mencoba bertanya kembali mengenai siapa yang menjadi patron/model dalam menentukan pilihannya. Dari 36 informan, sebanyak 21 informan menjawab dari suami dan keluarga, dari komunitas sebanyak 6 informan dan selanjutnya 9 informan dari diri sendiri. Pengaruh internal memang sangat ampuh dalam mempengaruhi pemilih terutama kaum perempuan.

Walau setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya. Peningkaran suatu masyarakat terhadap kebutuhan untuk diakui (*politics of recognition*) merupakan akar dari segala ketimpangan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam pemilihan calon legislatif, faktor kedekatan bisa jadi semakin berkurang untuk dilihat sebagai pilihan politik. Berikut kesimpulan alasan-alasan yang berikan oleh informan, dimana muncul dua persepsi dalam memilih.

kedekatan daerah dan budaya	
Alasan 1	Informan menganggap dukungan terhadap calon dari keluarga atau daerah sendiri lebih baik dan lebih mengetahui kondisi masyarakatnya

Alasan 2	Informan menganggap kualitas, aspiratif dan mempunyai visi lebih baik untuk dipilih.
-----------------	--

Dari 36 informan yang diwawancarai berkenaan dengan factor kedekatan dan budaya dalam memilih, terlihat dua alasan sebanding yaitu masing-masing 18 informan. Para informan mempunyai pendapat sendiri mengenai factor kedekatan dalam pilihan politiknya, berikut beberapa pernyataan informan, baik yang melihat factor kedekatan:

“Lebih menyukai kampung karena lebih kita kenal bagaimana kehidupannya” (Rosmiati, 36thn, Paloh Lada).

“Kalau saya lebih memilih dari kampung karena dia lebih memahami dan mengerti bagaimana kondisi masyarakat..” (Eli Farida, 50thn, Paloh Lada)

“Dari gampong, tapi kita melihat juga pendidikan dan kapasitas dia juga..” (Yusnida Riani, 35thn, Gp. Buket, Kuta Makmur).

“Lebih condong pada keluarga..” (Nurul Mauzidah, 22thn, Nibong).

Dan yang melihat kedekatan bukanlah hal yang utama:

“Tidak mesti, apabila dari kecamatan atau wilayah lain lebih mampu tidak ada salahnya...” (Julia Safitri, 23thn, Simpang Kramat).

“Kita lebih melihat yang lebih punya pengalaman dan pendidikannya, pokoknya berkualitaslah..” (Juliani, 32thn, Gp Buket, Kuta Makmur).

“Saya sih tidak mesti dari kecamatan, kita melihat bagaimana caleg yang cocok dan kita rasa mampu menampung aspirasi masyarakat nantinya..” (Micha Yuspasari, 22thn, Nibong).

Dalam penelitian ini frasa kedaerahan dipersempit dengan desa/gampong atau kecamatan saja. Karena kondisi di atas, sebagian besar informan tidak terlalu mempersoalkan masalah kedaerahan. Dalam pengamatan dan diskusi informal dengan beberapa masyarakat dan informan, sebagian masyarakat dan informan tinggal di kecamatan bahkan desa/gampong sama dengan calon legislatif (caleg)

perempuan. Namun, di antara informan ada yang tidak tahu dirinya satu kecamatan dengan calon perempuan tertentu, meski ia kenal dengan calon tersebut.

Kondisi ini terjadi antara lain karena masalah kedaerahan bukan topik yang dijual dalam kampanye atau sering disebut media. Hal ini juga terlihat pada pertanyaan pengaruh budaya terhadap daya pikat pemilih. Walau masih terkesan, namun sebagian informan telah melihat hal kemampuan calon lebih utama dari pengaruh budaya. Dari 36 informan yang diwawancarai, sebanyak 17 informan melihat budaya mempengaruhi pilihannya dan 19 informan lebih melihat kemampuan dan kepeduliannya terhadap masyarakat. Berikut terlihat dari rangkuman alasan yang diberikan informan.

Pengaruh budaya	
Alasan 1	Berpengaruh terhadap pola pikir, pengenalan masyarakat, lingkungan social dan agama serta kebiasaan perempuan.
Alasan 2	Tidak terpengaruh, karena yang penting peduli masyarakat, mampu da nada kemampuan dalam politik

Dari wawancara di atas, Sebagian informan tidak melihat pengaruh budaya menjadi penting untuk melihat calon legislatif (caleg) yang akan dipilih. Hal ini seharusnya telah membuka peluang untuk kaum perempuan yang selama ini terkotomi dalam sebuah budaya patriakis di Aceh, dimana hasil pengamatan peneliti terlihat bahwa fenomena yang muncul setelah konflik di Aceh, laki-laki yang lebih

berperan dalam bidang politik. Sehingga pilihan perempuan pun akan perwakilan politiknya mayoritas laki-laki.

Namun demikian, Dari beberapa pertanyaan penelitian yang mengarah kepada peranan kaum perempuan dalam kehidupan politiknya, kebanyakan informan suka akan perkembangan keberanian kaum perempuan dalam menyuarakan aspirasinya. Seperti beberapa pendapat informan berikut:

*“Hal yang sangat luar biasa ya bisa jadi pahlawan bagi perempuan”
(Mardiana, 23thn, Sumbok Rayeuek)*

“Luar biasa kalau ada perempuan seperti itu...” (Nurul Ima, 40thn, Krueng Mate)

“Hebat berarti ingin merubah gak mau terjajah lagi dengan masalah perempuan” (Shindiana, 35thn, Tambon Tunong)

“Sangat hebat dan saya salut sama perempuan – perempuan tersebut...” (Cut Fitriana, 25thn, Tring Matang Ubi)

“Ya luar biasa bagi saya” (Ita Hajriani, 27thn, Rawang Itek)

“Sangat luar biasa dan saya mendukung keberanian mereka” (Marliar, 37thn, Tring Matang Ubi)

Dengan perkembangan akses perempuan di politik tentunya membuka peluang berkiprahnya perempuan dalam parlemen di Aceh. Dari keterbukaan ini juga terlihat pada 36 informan yang peneliti wawancara, sebanyak 26 informan menyukai keberadaan perempuan dalam politik dengan syarat harus jujur, punya pendidikan, kemauan yang keras dan berwawasan dalam memahami masalah, terutama masalah kaum perempuan.

Keterbukaan ruang berkiprahnya kaum perempuan di kehidupan politik, tentunya harus didukung dengan kepercayaan yang baik juga terutama dari kaum perempuan itu sendiri untuk menggolkan perempuan ke parlemen. Beberapa kepercayaan tersebut dituangkan dalam keinginan dan harapan calon legislative dari kaum perempuan nantinya:

“Caleg yang dapat mengayomi dan berinteraksi dengan masyarakat” (Julia Safitri, 23 thn, Simpang Kramat).

“..Yang tidak mengutamakan kepentingan pribadinya” (Mulyana, 28thn, Sp Kramat).

“...Yang dapat dipegang janjinya” (Nana Mulyana, 22thn, Gp. Buket)

“Jujur, sopan santun dan berpendidikan” (Yusnida Riani, 35thn, Gp. Buket).

“Mungkin dari kesopanan, karisma dan pergaulan dia dengan lingkungan masyarakat” (Siti Arafah, 27thn, Nibong).

“...Punya pendidikan tinggi dan pengalaman..... Selalu optimis, tidak mementingkan diri sendiri, selalu merakyat dan tidak sombong” (Fitriana, 24thn, Tring Matang Ubi).

Alasan dari informan menyangkut pertimbangan kultural, seperti; Pertimbangan kultural menjadi lemah dalam perilaku pemilih kaum Perempuan di Aceh Utara jika melihat hasil saring beberapa pendapat informan yang notabeneanya adalah perempuan. Namun demikian ketika ditanyakan akan kepercayaan, harapannya adalah munculnya indikator yang lebih baik dari calon perempuan. Informan menyebutkan peduli kepada masyarakat, jujur, berpendidikan, tidak sombong dan sopan. Dalam beberapa alasan non formal interview juga didapati bahwa Informan juga memilih calon yang sama dengan tempat tinggal mereka jika calon bersangkutan sudah memiliki jasa, baik kepada informan maupun kepada desa/gampong informan.

Segmentasi perempuan merupakan salah satu strategi dalam mengelola pemilih perempuan yang sangat heterogen. Pemilih perempuan adalah kelompok sasaran strategis karena jumlah mereka yang lebih banyak dibandingkan pemilih laki-laki di kabupaten Aceh Utara. Jumlah pemilih perempuan 198.958 jiwa (51.2%), dan pemilih laki-laki berjumlah 189.710 jiwa (48.8%), dengan total pemilih kabupaten Aceh Utara sebanyak 388.668 jiwa.

Oleh Karena itu, dalam pemilu legislative tahun 2014 di kabupaten Aceh Utara, pemilih dari segmen Perempuan mendapatkan perhatian dari calon legislatif

(caleg). Hasil observasi, beberapa calon legislatif (caleg) berusaha meraih simpati Perempuan dengan menggelar pertemuan bersama kelompok-kelompok perempuan dalam masyarakat dan menyampaikan visi dan misi kepada mereka. Perempuan yang hadir dalam pertemuan tersebut mendapatkan kompensasi langsung, seperti kain sarung, kerudung dan juga bantuan tunai. Calon legislatif (caleg) menggunakan jaringan di dalam kelompok tersebut untuk mengumpulkan para anggota. Untuk terlaksananya pertemuan tersebut, calon legislatif (caleg) atau partai politik yang mengusung calon legislatif (caleg), sudah harus mengeluarkan biaya tertentu, misalnya untuk makan dan minum peserta.

Dari 36 informan awal yang diwawancarai dalam penelitian ini, ada yang tidak berani memberikan informasi terperinci dikarenakan pertanyaan dianggap memasuki wilayah politik, dimana kebanyakan informan tidak menyukai untuk membahasnya. Oleh karena itu pertanyaan disesuaikan dalam proses wawancara melalui perbincangan alamiah. Dengan strategi ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang sesuai aslinya, tanpa adanya pemalsuan informasi dari informan untuk tujuan tertentu. Walaupun didapati dalam beberapa kasus, beberapa informan memberikan informasi yang serupa dengan informan sebelumnya.

Wawancara menggunakan daftar pertanyaan tertulis sebagai pedoman. Namun, di lapangan dilakukan pengembangan sesuai dengan informasi yang disampaikan informan sehingga banyak informasi yang tidak seluruhnya menjawab pertanyaan dalam pedoman wawancara, melainkan menambah beberapa pertanyaan menyangkut alasan dan pemahaman politik kaum perempuan di kabupaten Aceh Utara.

Dari 36 informan yang diwawancarai dengan pertanyaan mengenai lebih memilih calon legislatif laki-laki atau perempuan. Sebanyak 30 informan menjawab

lebih percaya kepada laki-laki dan 5 informan kepada perempuan dan 1 informan boleh kedua-duanya. Informan menjawab cenderung lebih percaya kepada laki-laki dari pada perempuan, memberi alasan bahwa calon legislatif (caleg) laki-laki lebih cocok, lebih berhak, handal sebagai pemimpin, logis dan tidak memakai perasaan, banyak wawasan, bertanggung jawab, tegas, kokoh sesuai perintah agama dan lebih baik dalam mempertahankan dan mengamankan negara, dibandingkan calon legislatif (caleg) perempuan. Sedangkan yang memilih perempuan dalam pemilu legislatif mempunyai alasan bahwa perempuan lebih memahami sesama perempuan, lebih komunikatif dengan perempuan dan juga peka pada situasi serta perempuan. Kendati demikian dalam beberapa jawaban yang lebih mendalam, informan tidak berani mengeluarkan argumennya secara panjang karena takut akan ranah politik yang mereka bicarakan bisa berdampak negatif terhadap kehidupan sosialnya.

Dilihat dari jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan legislatif di Aceh Utara, perempuan tentunya mempunyai nilai strategis untuk menghadirkan kaumnya lebih banyak di lembaga legislatif untuk menyuarakan kepentingan perempuan. Hal ini karena pemilih dari kaum perempuan melebihi kaum laki-laki. Terlepas dari pengaruh pengaruh strata sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat, tentunya faktor lain juga bermuara pada tingkat kepercayaan kaum perempuan itu sendiri terhadap kaumnya untuk ikut berpartisipasi dalam politik.

Hal ini kemudian menjadi relevan untuk dikaji lebih mendalam dalam kaitan dengan politik kaum perempuan dan keterlibatannya pada lembaga-lembaga dan institusi politik dalam pengambilan keputusan-keputusan politik yang berkenaan dengan perempuan dan masyarakat di Aceh Utara serta strategi

pemberdayaan politik perempuan sesuai dengan konteks kearifan local oleh lembaga-lembaga terkait di kabupaten Aceh Utara. Sebagaimana pernyataan McCarthy dan Zald (1987); Tarrow (1994), sebagai sebuah mobilisasi, gerakan mengandalkan sepenuhnya pada dua hal: peran aktor atau institusi dan /atau struktur kesempatan politik.

BAB VI

PEREMPUAN DALAM RUANG PUBLIK DAN STRATEGI PEMBERDAYAANNYA

A. Keterlibatan Perempuan Pada Lembaga-Lembaga Dan Institusi Politik Dan Dalam Pengambilan Keputusan Bagi Politik Perempuan

Keberdayaan politik sebagai kegiatan untuk ikut aktif dalam kehidupan politik, dimana kegiatan ini mencakup pemberian suara lewat pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat atau anggota perlemen dan sebagainya. Dalam politik perempuan keberdayaan politik dapat diartikan sebagai keikutsertaan perempuan untuk mengambil bagian dalam proses pembentukan kebijakan umum atau mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, salah satunya adalah keikutsertaannya sebagai anggota partai politik, yang kemudian menghandarkannya sebagai wakil di lembaga legislatif. Berikut ini beberapa pertanyaan wawancara mengenai pemahaman politik kaum perempuan di kabupaten Aceh Utara.

Pertama, adalah ketertarikan informan terhadap partai politik, didapati 35 informan dari 36 informan yang diwawancarai menjawab tidak tertarik dengan partai politik dan juga tidak terlibat. Sebagaimana pendapat 1 di bawah dan pendapat 2 menjadi pengalaman dari satu informan yang terlibat dengan partai politik.

Tabel 4.4.1: Ketertarikan dalam partai politik	
	Tidak suka, tidak dibolehkan suami, bermasalah saja,
	Pernah menjadi pengurus saja dan itu juga atas ajakan

Dari jawaban di atas tergambar bahwa peluang 30 persen perempuan dalam politik belum mengilhami kehidupan politik perempuan di kabupaten Aceh Utara. Hal ini tentunya tidak menafikan Perjuangan gigih koalisi para aktivis permasalahan perempuan dan koalisi perempuan anggota parlemen, di tengah berseminya alam demokrasi dan keterbukaan di era Reformasi, secara menagerial implementasi tindakan afirmatif, hal perwakilan perempuan di parlemen dan partai politik telah berhasil diundangkan secara formal dalam undang-undang pemilu No. 12 tahun 2003. Karena Aceh baru memasuki era damai dan aman dari konflik berkepanjangan yang mengakibatkan lumpuhnya partai-partai politik dalam menjalankan pandangan politik, termasuk melibatkan segmen kaum perempuan di Aceh.

Namun demikian, dari hasil pertanyaan pandangan terhadap perempuan di partai politik sekarang ini, sebanyak 25 informan menyukai dan menyatakan bagus adanya perempuan yang sudah mulai berkiprah dalam dunia politik melalui partai. Selanjutnya 11 informan masih menyatakan sebaiknya tidak usah bagi perempuan di partai politik. Berikut beberapa pendapat yang mendukung dan yang tidak mendukung keterlibatan perempuan dalam partai politik:

“Bagus juga sih, tapi bagi perempuan.....yang punya pendidikan dan wawasan yang tinggi” (Eli Farida, 50thn, Paloh Lada).

“Saya menilai mereka secara positif dan mendukung” (Resti Maria, 30thn, Rawang Itek).

“Perempuan dalam partai politik perlu asalkan berkualitas” (Murnian, 36thn, Ms. Tutong)

“Perlu ada perempuan dalam partai politik” (Ita Hijriani, 27thn, Rawang Itek).

“...Yang selama ini yang saya kenal bagus mereka bisa dijadikan contoh buat anak remaja perempuan” (Karmila, 41thn, Tambon Baroeh).

Yang tidak mendukung,

“Kurang bagus, lebih baik ngak usah aja” (Rosmiati, 36thn, Paloh Lada). “Perempuan itu lebih baik jadi orang rumahan bukan di Parpol” (Zea Noviana, 25thn, Sama Kurok).

“Perempuan itu lebih baik jadi orang rumahan, kalau ia berada di Parpol saya tidak yakin dengan kemampuan mereka” (Susiana, 27thn, Ms. Tutong).

“Bagi saya wajar - wajar saja asalkan dia mampu akan tetapi lebih baik jika perempuan itu di rumah saja” (Raudhatul Jannah, 26thn, Sama Kurok).

“Perempuan itu lebih baik tidak ada dalam ranah politik” (Cut Fitriana, 25thn, Tring Matang Ubi).

Beberapa rangkuman pandangan di masukkan dalam tabel

.Tabel 4.4.2: Pandangan terhadap perempuan dalam partai	
pendapat 1	Bagus kalau ada kemauan, punya hak, emansipasi wanita,
	Lebih baik tidak usah, tidak baik untuk perempuan,

Pandangan politik bagi perempuan tentunya tidak terlepas dari pemahaman politik pada masa reformasi kini yang mengalami perkembangan luas dalam perwujudan demokrasi, dimana partisipasi politik merupakan prasyarat mutlak dalam proses demokrasi tersebut.

Trauma konflik di Aceh, khususnya di kabupaten Aceh Utara sedikitnya telah mengakar di dalam masyarakat, dan bahkan telah merasuki pemikiran sebagian mayoritas perempuan di Aceh. Kondisi ini membuat mereka secara psikologis tak siap untuk berpartisipasi dalam politik. Banyak perempuan yang terjangkit rasa

takut, rasa rendah diri dan merasa tak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menangani isu-isu politis. Keadaan ini membuat banyak perempuan menunjukkan sikap atau pendekatan pasif terhadap politik, bahkan banyak diantaranya memandang politik hanya cocok bagi laki-laki saja. Beberapa pandangan informan ketika ditanya tentang perempuan ada di partai politik;

“...perempuan itu lebih baik tidak dalam ranah politik..” (Cut Fitriani, 25thn, Tring Matang Ubi)

*“...Tidak Perlu” (Hajjah Marwati. M.Nur, S.Pd, 45thn, Mns.Tutong).
... Bagi saya tidak baik perempuan dalam partai politik...(Nur Aida, 30thn, Samok Kurok).*

“...Kurang bagus perempuan di partai politik, lebih baik dirumah saja..”(Rosmawati, 50thn, Krueng Mane).

Pendapat -Pendapat para informan bukan hanya tanggapan semata, akan tetapi terasa dalam kehidupan partai politik saat ini yang sangat susah mendapatkan anggota perempuan benar-benar memahami politik untuk memenuhi barisan perjuangan partai. Apalagi di partai politik nasional yang tidak berapa populer di Aceh Utara. Hal ini seperti yang disampaikan oleh ketua partai politik PKPI Aceh Utara Khomaini bahwa:

“ Prinsipnya, partai akan membuka diri kepada siapa saja, apakah perempuan atau laki-laki. Memang nyatanya perempuan tidak begitu tertarik pada urusan politik, jadi kami (pengurus) harus menemukan cara- cara yang tepat untuk meraih konsituen perempuan..”(wawancara tanggal 06 Agustus 2016).

Pendapat yang sama disampaikan oleh pengurus harian partai lokal Aceh, Herlin, SH bahwa:

“... Pasti saya juga tidak begitu tau. Tapi kayaknya seperti saya katakan tadi bahwa perempuan cenderung menghindar dari urusan politik.” (wawancara 07 Agustus 2016)

Selanjutnya pandangan peran ganda perempuan sebagai ibu dan istri, dan sebagai anggota dari angkatan kerja produktif juga menghambat kaum perempuan, sebab mengurangi alokasi waktu mereka untuk melakukan aktivitas-aktivitas politik. *Stereotyping* masyarakat terhadap kaum perempuan juga melahirkan masalah-masalah lain dalam menjalani peranan ganda itu, biasanya adalah praktek-praktek di dalam organisasi dan partai-partai politik tidak mengakui dan mengakomodasi peran ganda perempuan. Walaupun kemudian banyak perempuan pekerja dapat menyesuaikan waktu dalam peran ganda. Berikut pernyataan ibu Riyanti bahwa:

“...Saya merasakan awal-awal menjadi anggota legislatif sangat rumit membagi waktu antara kerja di dewan dan status saya sebagai seorang isteri yang mengurus rumah tangga saya, namun seiring waktu berjalan terjadi penyesuaian penggunaan waktu yang simbang, antara kerja dan rumah tangga..” (wawancara, 21 September 2015.

Pernyataan yang sama juga dinyatakan oleh Khomeini bahwa: *“... tidak baik perempuan berpolitik. Sejauh mereka tidak meninggalkan tugas-tugas pokoknya sebagai istri juga sebagai ibu bagi anak-anak mereka...” (wawancara 06 Agustus 2016).* Selanjutnya pendapat sama juga disampaikan oleh Fadly, salah pengurus bidang sosial di partai lokal Aceh: *“ Pendapat saya begini, perempuan boleh saja berpolitik, bisa saja naek jadi caleg atau Bupati sekalipun, tapi tentunya harus tetap pada posisi kodrat dia sebagai perempuan.” (wawancara 07 Agustus 2016).*

Di samping itu, tingkat sosialisasi politik terhadap perempuan demikian rendah, tidak banyak perempuan aktif bisa secara total berkiprah sebagai kader partai. Hal ini muncul ketika ada kecenderungan dalam menyeleksi kandidat perempuan yang memiliki hubungan dekat dengan pimpinan atau penguasa.

Selanjutnya kepemimpinan parpol cenderung didominasi kaum lelaki, dan pada gilirannya mereka cenderung hanya menominasikan kandidat-kandidat lelaki yang mereka yakini berpotensi besar memenangkan pemilihan. Beberapa pendapat mengapa perempuan tidak dipilih dalam pemilihan umum legislatif di kabupaten Aceh Utara:

Tabel 4.4.3: Pandangan tidak memilih calon perempuan	
pendapat 1	Kurang dipercaya, kurang adaptasi dengan masyarakat,
	Kurang sosialisasi, kurang banyak calonnya, kurang

Pendapat yang sama disampaikan oleh pengurus partai lokal di Aceh, Herlin, SH bahwa:

“...Satu sisi barang kali seperti itu. saya melihat bahwa persoalan ini lebih kepada para calegnya itu sendiri. Ketokohan mereka di tengah masyarakat itu tidak ada. Masyarakat tidak mengetahui mereka dengan baik. Tokoh-tokoh publik yang muncul itu semuanya adalah laki-laki. Maka, laki-laki lah yang dipilih.”(wawancara, 07 Agustus 2016)

Pendapat sama juga disampaikan oleh Fadly, bahwa; *“...kita juga harus paham karakter pemilih kita. kekalahan mereka (perempuan) jangan dianggap kesalahan partai yang tidak bekerja dengan baik. Mungkin saja mereka belum bersosialisasi dengan baik kepada masyarakat..” (wawancara 07 Agustus 2016).*

Demikian pula mengenai harapan-harapan yang ingin disampaikan mengenai kepada calon legislatif perempuan untuk terpilih kembali, maka beberapa informan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

“Perempuan harus memperbaiki diri” (Cut Fitriana, 25thn, Tring Matang Ubi).

“Harus banyak bersosialisasi dengan masyarakat khususnya perempuan”

(Murnia Sari, 36thn, Meunasah Tutong).
 “Saya berharap mereka bisa memenuhi janji kepada masyarakat”
 (Raudhatul Jannah, 26thn, sama Kurok)
 “kaum perempuan harus belajar politik lebih dalam” (Elly Sukria,
 35thn, Keude Geudong).
 “...Belajarlah politik dengan baik dan tingkatkan
 kepercayaan masyarakat” (Elfi Susanti, 29thn, Keude Geudong).
 “...harus banyak lagi calon perempuan...”(Marliah, 37thn, Sumbok
 Rayeuk).

Berdayanya perempuan di bidang politik kini mengalami perluasan peran menjadi anggota parlemen. Keikutsertaan perempuan dalam pemilu legislatif menunjukkan adanya kemajuan bagi proses demokrasi yang berbudaya partipatoris, keterwakilan perempuan di parlemen diharapkan mampu menampung berbagai aspirasi yang berkaitan dengan masalah perempuan. Keterwakilan perempuan yang memadai di lembaga legislatif adalah sebuah upaya untuk memperjuangkan kepentingan kaum perempuan namun sampai saat ini keterwakilan perempuan dipangung politik dan lembaga politik formal jumlahnya sangat rendah dibandingkan laki-laki. Beberapa harapan perempuan di kabupaten Aceh Utara kepada politikus perempuan dalam kiprahnya sebagai legislator di Dewan perwakilan Rakyat:

Tabel 4.4.4: Harapan dan pandangan terhadap Calon Legislatif	
pendapat 1	Peduli kepada perempuan dan masyarakat, Jujur, lebih aktif
	Tidak bisa karena minim jumlahnya, perempuan

Harapan-harapan ini diharapkan menjadi program-program yang membangun bagi masyarakat dan konstituennya. Berikut harapan program kebijakan dari informan yang merupakan konstituennya:

Tabel 4.4.5: Harapan program pada calon perempuan
--

pendapat 1	Peduli pada perempuan dan anak, Membangun gampong,
	Memenuhi janji politiknya, peningkatan kualitas politik

Rendahnya representasi perempuan di lembaga-lembaga politik di Aceh berdampak sangat buruk terhadap kehidupan perempuan. Sebagian besar kebijakan atau produk hukum yang langsung mempengaruhi kehidupan perempuan dibuat oleh kaum laki-laki yang tidak berempati maupun memahami pengalaman hidup kaum perempuan. Salah satu contohnya adalah fakta bahwa banyak kasus-kasus pelecehan perempuan dan anak pasca konflik di Aceh hanya mengundang simpati saja para legislator, namun tidak sampai pada proses kebijakan yang berpihak pada perlindungan secara khusus dalam *local wisdom* di Aceh. Berikut pernyataan ibu Naimah bahwa;

“.....Di kabupaten Aceh Utara, kami lebih banyak menangani kasus-kasus KDRT, korban konflik, pelecehan seksual dan anak-anak terlantar termasuk pada pengungsi Rohingya yang ada di Aceh Utara....pernah kami paparkan di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Aceh Utara dalam bentuk film dokumenter, mereka sangat simpati dan empati. Namun hanya sebatas itu saja, untuk kemudian tindak lanjutnya tidak terlibat lagi,.. yang mau turun ke lapangan hanya ibu Riyanti saja...” (wawancara tanggal 15 Juli 2016).

Hal ini senada dengan pendapat Ibu Riyanti bahwa:

“...Persoalan KDRT dan korban konflik serta pengungsi dalam hal ini perempuan dan anak yang ditangani oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, biasanya saya akan melibatkan diri dan ikut serta dalam kunjungan dan program penanganannya...” (wawancara tanggal 21 September 2015).

Konflik di Aceh telah membuat kondisi sosial tidak aman dan tidak ramah dalam dunia politik di Aceh, terutama menjelang pemilihan umum legislatif dan pemilihan kepala daerah. Namun berbeda dalam tahun 2014 lalu, kebijakan dalam satu kesepakatan bersama antara eksekutif, legislatif dan lembaga yudikatif

serta melibatkan partai politik lokal dan nasional telah memberikan rasa aman dalam proses pelaksanaan pemilu bagi masyarakat. Berikut dari 36 informan yang ditanya mengenai intimidasi yang dirasakan dalam masa pemilu legislatif, 33 menyatakan aman dan nyaman dilokasi pemungutan suara (TPS) dan hanya 3 informan yang menyatakan tidak nyaman. Hal ini menyatakan bahwa kondisi keamanan tidak menjadi faktor yang mempengaruhi perempuan tidak memilih perempuan. Walaupun 27 informan masih merasa was-was hasil pemilu legislatif yang tidak diharapkan oleh kelompok berkepentingan akan mengakibatkan konflik kembali.

B. Pandangan Terhadap Strategi Pemberdayaan Politik Bagi Perempuan Aceh

Strategi merupakan suatu rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi yang sesuai dengan misi yang hendak dicapainya, sekaligus untuk melaksanakan mandat atau tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan mempertimbangkan pengaruh faktor lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal, dimana strategi tersebut harus bersifat efektif. Memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dan menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan kaum perempuan terus diupayakan oleh lembaga- lembaga terkait di kabupaten Aceh Utara.

Peningkatan kapasitas perempuan dibidang politik bukanlah hal yang baru. Demokrasi adalah satu-satunya model pemerintahan yang memberikan ruang bagi keadilan, pemberdayaan (*empowerment*), legitimasi popular, dan kesetaraan. Konsep feminisme yang berkembang, tentunya tidak ditafsirkan dalam ranah tuntutan kesetaraan gender dalam perspektif sempit, akan tetapi lebih

kepada peningkatan daya perempuan dalam keikutsertaannya menyokong pembangunan negara. Beberapa strategi yang dilaksanakan di Aceh Utara, baik itu pendidikan politik, lobbi politik, pembentukan wadah perempuan maupun menumbuhkan jaringan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik.

Aceh yang merupakan satu-satunya propinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam sebagai tata nilai sosial kemasyarakatannya tentu melihat pemberdayaan perempuan menjadi penting di segala bidang, Namun demikian ranah politik tidak menjadi prioritas utama, persoalan-persoalan sosial lebih muncul dan menjadi agenda utama lembaga-lembaga terkait. Berikut pernyataan Ibu Naimah bahwa;

“...lembaga-lembaga pemerintah seperti Dinas Pemberdayaan Wanita juga mempunyai agenda sosialisasi politik bagi perempuan di Aceh Utara, namun itu dijalankan saat setahun menjelang pilkada atau pemilu legislatif. Hal ini karena persoalan kasus KDRT dan Pelecehan anak dan perempuan lebih banyak menyita waktu dan tenaga bahkan anggaran kami.. agenda sosialisasi politik sendiri biasanya dilakukan secara informal yaitu dengan menyelipkan masukan-masukan untuk memilih kaum perempuan yang mampu dan kredibel untuk di pilih,,, ”(wawancara tanggal 15 Juli 2016)

Dari pernyataan di atas terlihat bahwa persoalan politik perempuan masih kurang mendapat tempat utama dalam program-program pemerintahan dan juga lembaga-lembaga perempuan untuk mengangkat lebih banyak lagi perwakilannya dalam parlemen di Aceh khususnya di kabupaten Aceh Utara. Padahal fenomena satu kursi keterwakilan perempuan di DPRK Aceh Utara harusnya mendapat dukungan yang banyak guna peningkatan minat dan adanya upaya untuk bisa mewujudkan terpenuhinya keterwakilan jumlah perempuan yang representatif dalam bidang politik. Karena *“... politik menjadi salah satu pintu dalam membantu pemberdayaan ekonomi dan kasus perempuan dan anak di masyarakat”*. (Ibu Naimah, wawancara tanggal 15 Juli 2016).

Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara sendiri melihat program pemberdayaan perempuan yang diajukan oleh pemerintah mengarah kepada perbaikan ekonomi perempuan dan perlindungan anak. Sedangkan untuk program politik perempuan hanya sosialisasi politik saja dan itu pun untuk semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan. Berikut pernyataan ibu Riyanti bahwa:

“.. Tidak banyak program yang dikhususkan pada perempuan yang diajukan pemerintah daerah. ..kalaupun ada lebih kepada pemberdayaan ekonomi dalam rangka mengentaskan kemiskinan.”(wawancara, 21 September 2015)

Selanjutnya ibu Naimah juga menyatakan bahwa:

“...Anggaran yang alokasikan ke kami sangat terbatas banyak terserap untuk penyelesaian kasus-kasus perempuan, sehingga program sosialisasi politik bagi perempuan hanya dapat dilakukan setahun menjelang pemilihan umum terutama pemilu legislatif,,,agenda yang dijalankan pun berbentuk pertemuan diskusi interaktif dengan beberapa komunitas perempuan dan tidak bisa menyeluruh se kabupaten Aceh Utara.”(wawancara 15 Juli 2016)

Sedangkan strategi yang dilakukan oleh beberapa partai politik dalam meningkatkan partisipasi kaum perempuan adalah peningkatan komunitas-komunitas perempuan dengan pendidikan politik yang mendukung kerjanya dalam politik. Namun kadang kendalanya adalah setelah pendidikan, kaum perempuan sedikit terkendala dengan anggaran dalam menjalankan jalan politiknya. Seperti pernyataan salah seorang pengurus Partai Politik Lokal Aceh, Herlin, SH bahwa:

“Partai melakukan apapun yang seharusnya dilakukan, dalam temu rapat selalu disinggung tentang pendidikan politik. apalagi saya yang saat ini bertanggung jawab dalam pendidikan kader..... Pendidikan politik di partai tentu harapannya adalah tumbuhnya kesadaran berpolitik dari anggota partai untuk kemudian meneruskannya kepada masyarakat.

.....Biasanya dilakukan saat-saat menjelang kampanye pemilu. Nah, di sini kader benar-benar didik strategi politik dan lainnya. itu yang bersifat formal....sedangkan pendidikan politik non-formal terbentuk secara alamiah. Mereka ikut rapat, ikut alam kegiatan atau acara. Seperti acara deklarasi Mualem itu bagian dari pendidikan politik yang tidak resmi..” (wawancara, 07 Agustus 2016).

Dalam hal khusus perempuan, Herlin, SH menyatakan bahwa;

“...partai memiliki program khusus untuk perempuan, organisasi apapun bahkan organisasi kampus sekalipun punya program khusus untuk perempuan. ada bidang-bidang yang memang pusat perhatiannya adalah perempuan. Salah satunya ialah organisasi perempuan..Organisasi itu diaktifkan lagi sesuai dengan tupoksi organisasi.” (wawancara, 07 Agustus 2016)

Lebih lanjut, Herlin menyatakan;

“..Di Partai Aceh, kita punya beberapa lembaga organisasi perempuan yang merupakan sayap dari PA. Ada yang dari PA sendiri ada pula sayap dari PA...seperti Srikandi, Liga Inoeng Aceh, Putroe Aceh dan terakhir Laskar Inoeng Bale. Nah, yang terakhir (Laskar Inoeng Aceh)

sebenarnya adalah lembaga sayap kanan partai. Tapi saya dengar sekarang mau masuk ke dalam partai... Mungkin ingin memiliki wadah yang representatif. Tapi kerugiannya mereka tidak bisa menerima dana bantuan dari pemerintah..” (wawancara 07 Agustus 2016)

Sedangkan di partai nasional seperti pernyataan ketua PKPI Aceh Utara, Khomeini bahwa:

“..Wate loen mantong jeut ke pengurus. Wate pileg thon yang kaleuh partai na program pendidikan politik bagi caleg ngoen anggota. Ketika itu kami diajari strategi politik dan macamlah. Saya rasa itu bagian dari upaya partai. Artinya, kader tidak dilepas begitu saja. Mita peng keudroe, mita su keudroe. Caleg pane na peng nyeu hana geu bantu leh partai. Peu lom ureung inong nyeu na peng umum jih akan dibelikan atra rumoeh droe. Belanja politik bagi perempuan hana that galak. Dari jak peuabeh peng keu politik get keu dapu..”(wawancara 06 Agustus 2016)

Politik dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dengan budaya yang melingkupinya. Dalam konteks Aceh, politik sangat terkonstruksi oleh budaya yang bersumber pada agama maupun nilai adat istiadat. Selanjutnya realitas kehidupan masyarakat umumnya tidak lepas dari budaya patriarhal, dimana budaya ini pula yang mendominasi semua elemen politik, mulai dari pemilih, maupun budaya yang berkembang dalam partai politik. Setelah itu menimbulkan pelemahan pada sisi minoritas seperti kaum perempuan.

Dalam penelitian ini, tergambar bahwa pemahaman politik dalam masyarakat kabupaten Aceh Utara sangatlah dipengaruhi oleh budaya dan juga trauma konflik, Hal ini terlihat dari mulai tidak tertatik terlibat dengan lembaga atau partai politik. Walaupun sebagian besar partai politik yang ada di kabupaten Aceh Utara membuka seluas-luasnya kesempatan bagi perempuan untuk mengisi 30% perempuan dalam partai.

Beberapa partai politik melihat perempuan yang tertarik untuk bergabung dalam partai politik itu biasanya adalah wanita yang pernah bekerja di lembaga swadaya masyarakat atau bekas aktivis perempuan. Namun itu Cuma sedikit untuk daerah Aceh Utara. Minimnya perempuan untuk aktif dalam politik itu diakibatkan oleh stigma budaya dan struktur dalam masyarakat. Dimana perempuan mempunyai peran ganda, di satu sisi sebagai pekerja dan dilain sisi sebagai isteri yang mengurus rumah tangga, peran ganda inilah kemudian memunculkan problema ketidak mampuan perempuan membagi waktunya dalam bersosialisasi dengan masyarakat, kurang berani berkampanye, terkendala anggaran dan pada akhirnya tidak dikenal dalam masyarakat.

Ketidak-keterkenalan calon-calon perempuan berakibat pada munculnya ketidak percayaan dalam masyarakat terhadap calon tersebut memunculkan

realitas kaum perempuan di kabupaten Aceh Utara tidak memahami politik dengan baik, tidak peka dan tidak berani serta ditempatkan di urutan bawah dari daftar calon. Namun demikian banyak kaum perempuan di Aceh Utara mengharapkan kepada legislator perempuan untuk lebih memperhatikan perempuan, anak-anak dan masyarakat.. Akhirnya harus dihadirkan inisiatif perbaikan keterlibatan perempuan dalam Politik di kabupaten Aceh Utara.

Undang-undang telah memperbaiki isu tentang kesetaraan gender di Indonesia melalui meratifikasi UU No. 7/1984 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* yang mengatakan:” *Discrimination against women (is) any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field (United Nations General Assembly, 1979)*. Selanjutnya UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 45 menyatakan hak-hak perempuan merupakan hak asasi manusia. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Pengarusutamaan gender yang pokok ke topik gender serta politik sesuai Instruksi Presiden No. 9/2000 menguraikan pengarusutamaan gender dimana kegunaan dan tujuan termasuk dalam legislatif, kebijakan dan inisiatif yang memiliki parlemen. Memasukkan pengarusutamaan gender akan membantu menciptakan parlemen yang lebih inklusif bagi kaum perempuan. Hal ini, relevan bagi perbaikan masa depan bagi perempuan dalam bidang politik.

Selanjutnya Kuota Aksi Affirmatif membantu meningkatkan jumlah perempuan dalam dunia politik seperti UU No. 12/2003 tentang pemilihan umum menerapkan kuota 30 persen perempuan di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten serta Kota untuk setiap Daerah Pemilihan. UU No. 10/2008 tentang calon parlemen potensial harus terdiri dari setidaknya 30 persen perempuan. UU No. 27/2009 tentang keterwakilan perempuan dalam setiap partai politik perlu terdiri dari setidaknya 30 persen dari anggota. Tentunya ini sangat penting mendorong pemenuhan kuota serta partai politik juga berperan dalam mengikis habis ideology patriarki, dan mengedepankan nilai profetik dalam partai politik. Walaupun disisi yang lain *Gender Responsive Budget (GRB)* belum dilaksanakan dalam ranah politik.

Jika dilihat dalam konsep pemberdayaan, Teguh S, (2004) menyatakan beberapa tahapan yang harus dilalui meliputi:

Pertama. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Dalam konteks ini, hasil penelitian menunjukkan sudah muncul kesadaran akan pentingnya kaum perempuan dalam lembaga legislatif untuk memperjuangkan hak-hak perempuan politik untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada perempuan. Walaupun masih munculnya pemikiran atau mitos bahwa laki-laki lebih utama dalam politik. Berkenaan dengan sumber daya manusia tentunya kearifan lokal tidak bisa dihindari dari pemahaman-pemahaman budaya patriarki dalam kaum perempuan dan masyarakat kabupaten Aceh Utara.

Kedua, Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Hal ini terasa

masih kurang disebabkan oleh minimnya program-program sosialisasi politik dikalangan perempuan di kabupaten Aceh Utara. Hasil penelitian memberi gambaran bahwa program-program pemerintah dan legislatif lebih bersifat pemberdayaan ekonomi, penanganan kasus- kasus kekerasan dalam rumah tangga, penanganan anak-anak, kesehatan dan juga pengungsian.

Ketiga, Tahap peningkatan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mehantarkan pada kemandirian. Di kabupaten Aceh Utara, program-program pemerintah dan legislatif tidak mengarah pada pendidikan politik secara kontinyu, akan tetapi bersifat temporary yaitu sesaat menjelang pemilihan umum. Hal ini tentunya tidak meningkatkan intelektual apalagi kemampuan inovasi dalam politik yang diharapkan untuk perbaikan partisipasi perempuan dalam politik di kabupaten Aceh Utara.

BAB VII

EPILOG: CATATAN AKHIR KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah wawancara mendalam dengan 36 informan di 12 desa/gampong dalam 6 kecamatan, unsur pemerintahan, legislatif dan partai politik baik lokal maupun nasional, diperoleh kesimpulan sementara sebagai berikut:

1. Pemahaman politik kaum perempuan di kabupaten Aceh Utara masih dibaluti oleh sistem budaya yang berkembang serta dipengaruhi oleh sistem keagamaan yang seolah-oleh membingkai aktivitas perempuan hanya mengatur rumah tangga saja. Peran ganda sebagai politikus dan sebagai seorang isteri belum bisa diterima dan dipahami dengan baik. Hal ini tentunya berakibat pada keterlibatannya dalam lembaga atau partai politik di daerah yang sangat sedikit bahkan tidak berminat. Walaupun sebagian besar memberi penghargaan baik bagi yang berkiprah di bagian politik. Baik itu sebagai anggota partai politik, lembaga yang mengurus politik atau keberanian yang bisa mengkritik kebijakan pemerintah.
2. Usaha pemberdayaan politik bagi kaum perempuan, perlu lebih diintensifkan serta dioptimalisasi di setiap sendi-sendi pembangunan daerah. Hal ini terlihat dalam hasil penelitian bahwa strategi pemberdayaan politik belum berjalan dengan baik bahkan hanya bersifat temporary saja ketika mendekati pemilihan umum diadakan. Untuk itu perlu terus melakukan pembinaan secara aktif bagi kaum perempuan di seluruh wilayah kabupaten Aceh Utara. Pengaruh politik kaum perempuan sendiri tidak hanya berkutat di lingkup legislatif maupun eksekutif saja, melainkan harus jauh lebih luas,

khususnya dalam ranah sosial dan pembangunan demokrasi menuju kecerdasan dalam berpolitik.

B. Saran

Berdasarkan hasil sementara observasi dan analisis data di lapangan, peneliti merekomendasi beberapa saran sementara sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan peran dan kinerja para anggota perempuan di dalam organisasi maupun partai politik, maka pendidikan politik menjadi urgen untuk dilaksanakan dan ditingkatkan. Namun demikian, perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi jasmani dan rohaninya, karena bagaimanapun juga terdapat perbedaan faktor biologis dan psikologis antara laki-laki dan perempuan. Faktor-faktor di atas merupakan kekurangan sekaligus kelebihan para perempuan. Akan tetapi dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, diharapkan pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan para perempuan di kabupaten Aceh Utara dapat berjalan dengan lebih efektif.
2. Melalui pendidikan politik diharapkan perempuan mampu berperan aktif dalam perpolitikan sehingga mendapatkan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip demokrasi maupun regulasinya dengan begitu lebih rasional dan beretika dalam menyikapi fenomena demokrasi dan politik, juga untuk menyadarkan kaum perempuan akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- A. M. W. Pranarka dan Vidhandika Moeljarto. 1996. Pemberdayaan (Empowerment), dalam Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarka (eds), *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta, hal.44-46
- Ambar Teguh Sulistiyani. 2004. *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya.Manusia*. Yogyakarta: Gaya Media.
- BPS Kabupaten Aceh Utara, 2016. *Aceh Utara dalam Angka 2015*. Online diakses 1 Agustus 2016
- Creswell, John W. 1994. *Research design: qualitative & quantitative approaches*. London: Sage Publications.
- Data Pemilih Tetap Propinsi Aceh tahun 2014. Komisi Independen Pemilihan Aceh.
- Friedrich Ebert Stiftung. 2005. *Southeast Asian Women in Politics and Decision-Making, Ten Years After Beijing: Gaining Ground?. Quezon City: FES Philippine Office and the Southeast Asia Women Watch (SEAWWatch)*.
- Harian Serambi Indonesia tanggal 24 April 2014
- Hasjmy, A. 1976. *59 Tahun Aceh Merdeka dibawah Pemerintahan Ratu*, Jakarta: Bulan Bintang, Idrus, Muhammad, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan kuantitatif*, Yogyakarta, Penerbit Erlangga.
- Ife, J.W., 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives- vision, Analysis and Practice*. Melbourne : Prentice-Hall.
- Mansur, M. Yahya et.al. 1988. *Sistem Kekerabatan dan Pola Pewarisan* Jakarta: PT Pustaka Grafika Kita.
- Mardhiah Aly, Teuku H. Ainal. 1980. "Pergerakan Wanita Aceh Masa Lampau sampai Masa Kini", dalam Ismail Suny (ed.), *Bunga Rampai tentang Aceh*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Mazdafiah, Siti. 2004. Feminism is X. http://www.kompas.ooll;!fkornpas-cetik/04_95/04/swaxall000693.htm. diakses 20 April 2014.
- McCarthy, John David and Zald, Mayer N. 1987. *Social Movements in an Organizational Society: Collected Essays*. Transaction Publishers.
- Najmah dan Khatimah sa'ida. 2003. *Revisi Politik perempuan*

Payne, M. 1997. *Modern Social Work Theory*. Chicago,IL: Lyceum

Prijono,dan Pranarka, 1996, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Penerbit Centre for Strategic and International Studies, Jakarta.

Riant Nugroho. 2008. *Pendidikan Indonesia : Harapan, Visi dan Strategi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sumodiningrat, G. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial* Jakarta: Gramedia.

Sugiyono. 2004, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabta,

Tarrow, Sidney G. 1994. *Social movements; Collective behavior; Social change; History*. New York and England: Cambridge University Press.
United Nations General Assembly. 1979. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*. New York: UN Women - Department of Economic and Social Affairs and Division for the Advancement of Women